

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STUDI EVALUASI
PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2005
PADA SMA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam
Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh:
Dardiansyah
NIM. 018264271**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Studi Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalan Bun, 25 Juni 2013
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

PAJAK MENBANGUN BANGSA
TGL. 20
C8018ABF274146841
SATUAN RIBU RUPIAH

6000

DJP

Dardjansyah
NIM. 018264271

ABSTRAK
STUDI EVALUASI
PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005
PADA SMA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dardiansyah
Universitas Terbuka Indonesia
dardipbun@yahoo.com

Kata Kunci :Pendidikan Nasional, Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tujuan untuk mendeskripsikan sejauhmana tingkat ketercapaiannya.

SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dijadikan subjek penelitian adalah seluruh SMA yang terdiri dari 9 SMA Negeri dan 3 SMA Swasta. Penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif, parameter penelitian menggunakan Indikator ketercapaian Standar Nasional Pendidikan khusus pada jenis pendidikan SMA. Instrumen utama penelitian adalah angket. Prosedur pengumpulan data melalui penyebaran angket kepada responden kepada masing-masing Kepala SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat. Alat dan prosedur validasi data adalah Dokumentasi dan verifikasi lapangan.

Hasil analisis data dalam penelitian adalah Standar Isi = 89%; Standar Kompetensi Lulusan = 82%; Standar Proses = 78%; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan = 69%; Standar Sarana dan Prasarana = 67%; Standar Pengelolaan = 85%; Standar Pembiayaan = 83%, dan Standar Penilaian Pendidikan = 94%.

Akhir dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk katagori baik dan jika dipersentasekan mencapai 80,87%. Dapat disimpulkan pula bahwa tidak ada satu pun SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencapai standar dengan angka ketercapaian 100%. Meskipun demikian masih ada 2 SMA dengan persentase ketercapaian tertinggi dengan katagori sangat baik, adalah SMA Negeri-1 Pangkalan Bun dengan persentase ketercapaian 91% dan SMA Negeri-2 Pangkalan Bun dengan persentase ketercapaian 89%.

Hasil penelitian evaluasi ini merupakan data yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pembinaan dan pengembangan SMA dan sebagai bahan evaluasi diri bagi SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.

ABSTRACT**EVALUATION STUDY
NATIONAL EDUCATION STANDARDS ACHIEVEMENT
UNDER GOVERNMENT REGULATION NUMBER 19 OF 2005
AT THE HIGH SCHOOL IN WEST KOTAWARINGIN**

Dardiansyah
Open University of Indonesia
dardipbun@yahoo.com

Keywords : National Education, High School (SMA) West Kotawaringin .

Issues examined in this study is the National Standards Achievement based on Government Regulation No. 19 Year 2005 on High School (SMA) in West Kotawaringin with the aim to describe the extent ketercapaiannya level. High School in West Kotawaringin were used as research subjects throughout high school that consists of 9 high schools and 3 private high school. Evaluation research with qualitative descriptive approach, parameter studies using indicators of achievement of the National Education Standards specifically on the type of high school education. The main research instrument was a questionnaire. Data collection procedures through distributing questionnaires to the respondents to each Head High School in West Kotawaringin. Tools and documentation procedures are data validation and field verification.

Results of data analysis in the study is the Content Standard= 89 %; Competency Standards= 82 %; Standard Process = 78 %; Teachers and Education Personnel Standard= 69 %; Standards for Infrastructure= 67 %; Standard Management= 85 %; Standard Financing= 83 %, and Educational Assessment Standards=94%.

End of this study lead to the conclusion that the level of achievement of the National Education Standards Based on Government Regulation No. 19 Year 2005 on High School in West Kotawaringin including both category and if dipersentasekan reached 80.87%. It can be concluded that none of the high school in West Kotawaringin have reached the standard with 100% achievement rate. Nevertheless there is still a 2 high school with the highest percentage of achievement in the category very well, is the SMA - 1 Pangkalan Bun with the achievement of 91% and the percentage of SMA - 2 Pangkalan Bun with percentage-achievement-of-89%.

The results of this evaluation is that the data can be used as consideration for the government, particularly the West Kotawaringin government in order to develop and the development of high school and as a self-evaluation for the high school in West Kotawaringin .

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : STUDI EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 PADA SMA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

NAMA : DARDIANSYAH, S.Pd, SE

NIM : 018264271

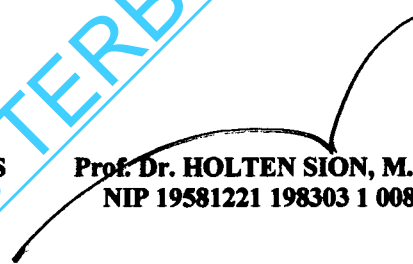
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP) / 90

Pembimbing I



**Prof. Dr. BONAVENTURA NGARAWULA, MS
NIK. 266/UM**

Pembimbing II



**Prof. Dr. HOLTEN SION, M.Pd
NIP 19581221 198303 1 008**

Mengetahui,

**Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik**

**Direktur Program Pascasarjana
Program Magister Administrasi Publik**



**FLORENTINA RATIH W, S.P, M.Si
NIP. 19710629 199802 2 001**




**SUCIATI, M.Sc, Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA : DARDIANSYAH, S.Pd, SE
N I M : 018264271
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Alamat : Jl.PRA. Kusumayudha No. 13 Pangkalan Bun
Judul TAPM : STUDI EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 PADA SMA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister Adminastrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu/ 21 Juli 2013
W a k t u : Pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS.

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji
Prof. Dr. HOLTEN SION, M.Pd

Penguji Ahli
Prof.Dr. SANGKALA,M.Si

Pembimbing I
Prof. Dr. BONAVENTURA NGARAWULA, MS

Pembimbing II
Prof. Dr. HOLTEN SION, M.Pd

Handwritten signatures of the exam committee members, including Prof. Dr. Holtén Sion, Prof. Dr. Sangkala, and Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Penulisan TAPM (Tesis) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
- (2). Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya selaku penyelenggara Program Pasca Sarjana;
- (3). Pembimbing I (Prof.DR. Bonaventura Ngarawula, MS).
- (4). Pembimbing II (Prof.DR. Holten Sion, M.Pd);
- (5). Penanggung Jawab Program Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Palangka Raya;

- (6). Orang tua saya yang selalu sayang dan mendoakan saya ketika mereka masih hidup pada saat menjelang ujian sidang tesis ini, serta Isteri dan anak-anak saya yang tersayang;
- (7). Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat beserta seluruh jajarannya;
- (8). Semua Kepala SMA/MA dan SMK se Kotawaringin Barat.
- (9). Semua Sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dan semangat dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhirnya saya berdoa semoga Allah SWT berkenan memberikan kekuatan, kesehatan lahir bathin dan kekuatan amal dan pikiran bagi saya serta berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang administrasi publik.

Pangkalan Bun, Mei 2013

Penulis,

Dardiansyah, S.Pd, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Pendidikan.....	7

2. Pendidikan Nasional.....	9
3. Kebijakan Publik	9
4. Kebijakan Publik Bidang Pendidikan	11
5. Standarisasi Pendidikan Nasional	13
6. Evaluasi Kebijakan Publik Bidang Pendidikan ...	14
B. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	18
C. Kerangka Berpikir	22
D. Defenisi Operasional	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Desain Penelitian	31
1. Pendekatan Penelitian	31
2. Lokasi Penelitian	32
3. Parameter Dalam Penelitian	32
B. Instrumen Penelitian	33
1. Angket	33
2. Dokumentasi.....	34
C. Responden Dalam Penelitian.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data	35
1. Penyebaran Angket	35
2. Studi dokumentasi	36
3. Verifikasi Lapangan	36

E. Metode dan Analisis Data	36
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Temuan	39
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
a. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat	39
b. Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaeingin Barat.....	49
c. Gambaran Umum SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	50
2. Temuan Data Hasil Penelitian.....	56
B. Pembahasan	59
1. Ketercapaian Masing-Masing Standar Nasional Pendidikan.....	59
a. Standar Isi	59
b. Standar Kompetensi Lulusan	60
c. Standar proses	61
d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan..	62
e. Standar Sarana dan Prasarana	63
f. Standar Pengelolaan.....	64

g. Standar Pembiayaan.....	65
h. Standar Penilaian Pendidikan	66
2. Rincian Ketercapaian Indikator Oleh masing- Masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.	71
a. SMA Negeri-1 Pangkalan Bun	71
b. SMA Negeri-2 Pangkalan Bun	74
c. SMA Negeri-3 pangkalan Bun	77
d. SMA Negeri-1 Kumai.....	80
e. SMA Negeri-2 Kumai.....	83
f. SMA Negeri-1 Kotawaringin Lama	86
g. SMA Negeri-1 Pangkalan Lada.....	90
h. SMA Negeri-1 Pangkalan Banteng	94
i. SMA Negeri-1 Arut Utara	97
j. SMA ABDI Pangkalan Bun.....	101
k. SMA PGRI-1 Pangkalan Bun.....	104
l. SMA PGRI-5 Pirsus Pangkalan Banteng	108
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	118
A. Simpulan.....	118
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	124

A. Indikator Ketercapaian SNP Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005.....	124
B. Angket	147
C. Rekapitulasi Hasil Angket.....	172
D. Rekapitulasi Hasil Angket dalam Persentase.....	173
E. Poto Copy Surat Izin Penelitian	174
F. Dokumentasi Photo Peneliti, Photo SMA di KabupatenKotawaringin Barat dan Photo Kepala Sekolah	175

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Tabel 2.1 : Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	18
2.	Tabel 2.2 : Jumlah SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	24
3.	Tabel 3.1 : Katagori Peringkat Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan.....	38
4.	Tabel 4.1.a : Rekapitulasi Hasil Angket Untuk Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan....	57
5.	Tabel 4.1.b: Rekapitulasi Hasil Angket Untuk Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan	58
6.	Tabel 4.2 : Pencapaian 38 Indikator Standar Isi.....	59
7.	Tabel 4.3 : Pencapaian 8 Indikator Standar Kompetensi Lulusan.....	60
8.	Tabel 4.4 : Pencapaian 23 Indikator Standar Proses.....	61
9.	Tabel 4.5 : Pencapaian 28 Indikator Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	62

10. Tabel 4.6	: Pencapaian 146 Indikator Sarana/ Prasarana ...	63
11. Tabel 4.7	: Pencapaian 88 Indikator Standar Pengelolaan ..	64
12. Tabel 4.8	: Pencapaian 17 Indikator Standar Pembiayaan ..	65
13. Tabel 4.9	: Pencapaian 40 Indikator Standar Penilaian Pendidikan	66
14. Tabel 4.10	: Presentase Tingkat Ketercapaian SNP oleh Masing-Masing SMA di Kabupaten Barat.....	67
15. Tabel 4.11	: Katagori Tingkat Ketercapaian SNP Oleh Masing-Masing SMA	68
16. Tabel 4.12	: Ranking Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan oleh SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat	112
17. Tabel 4.13	: Ranking Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan oleh Masing-Masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat	114

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.	Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Berpikir	25
2.	Gambar 4.1 : Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat	49
3.	Gambar 4.2 : Diagram Persentase Ketercapaian Rata- Rata Pencapaian SNP Pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat	69
4.	Gambar 4.3 : Diagram Persentase Ketercapaian SNP Oleh Masing-Masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat	70
5.	Gambar 4.4 : Ranking Tingkat Pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat	112
6.	Gambar 4.5 : Ranking Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Oleh SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat	115

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lampiran 1	: Indikator Ketercapaian SNP Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005	124
2. Lampiran 2	: Angket.....	147
3. Lampiran 3	: Rekapitulasi Hasil Angket	172
4. Lampiran 3	: Rekapitulasi Hasil Angket Dalam Persentase	173
5. Lampiran 3	: Poto Copy Surat Izin Penelitian.....	174
6. Lampiran 4	: Dokumentasi Photo Peneliti, SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Photo Kepala Sekolah.....	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan dan persoalan yang sangat kompleks. Kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pendidikan tersebut tentu disebabkan berbagai hal. Salah satunya adalah kondisi geografis suatu daerah di wilayah Indonesia. Perbedaan letak dan kondisi daerah di Indonesia tentu menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan yang adil dan merata. Sehingga tidak heran jika ada perbedaan layanan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Perbedaan layanan pendidikan tentu mengakibatkan perbedaan tingkat ketercapaian mutu pendidikan. Sebagai contoh, nilai ujian nasional rata-rata 8 di Jakarta boleh jadi sama mutunya dengan nilai rata-rata 6 di pelosok Kalimantan, karena perbedaan sarana/prasarana dan alat pendidikan. Itu hanya ditinjau dari faktor sarana/prasarana, belum lagi faktor-faktor lain seperti kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah terpencil yang jauh dari teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dapat dikatakan letak sebuah daerah dengan wilayah-wilayah administratif di bawahnya menjadi masalah tersendiri dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Sebagaimana di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari 6 kecamatan, meskipun hampir semua desa telah memiliki Sekolah Dasar, tetapi tentu ada perbedaan penyiapan sarana prasarana

pendidikan antara kota dengan desa terpencil. Untuk akses jenjang pendidikan menengah di tiap kecamatan misalnya, 3 kecamatan telah memiliki 3 jenis pendidikan menengah yaitu SMA/MA dan SMK, 2 kecamatan telah memiliki 2 jenis pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dan 1 kecamatan baru memiliki 1 jenis pendidikan menengah yaitu SMA.

Perbedaan akses jenis sekolah menengah pada tiap kecamatan ini menunjukkan akses pendidikan yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat belum merata. Hal ini mengingat 2 kecamatan masih termasuk daerah terpencil.

Pendidikan mempunyai peran strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Bidang pendidikan harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan nasional, karena pendidikan dapat memfasilitasi perubahan dan tantangan zaman.

Seperti kita ketahui bahwa pendidikan nasional masih dihadapkan pada masalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan, masalah peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing. Paling tidak masalah-masalah inilah yang menjadi fokus pembangunan nasional bidang pendidikan sekarang ini, karena masalah tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan strategis pendidikan nasional. Arah kebijakan strategis pendidikan nasional ini merupakan arah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang merata secara nasional.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pemerataan dan peningkatan layanan pendidikan yaitu adanya standarisasi pendidikan nasional. Kebijakan

standarisasi pendidikan nasional tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi :

1. Standar Isi.
2. Standar Proses.
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Standar Sarana dan Prasarana.
6. Standar Pengelolaan.
7. Standar Pembiayaan.
8. Standar Penilaian Pendidikan.

Pada ayat (2) menjelaskan :

”Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.”

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini sudah barang tentu harus diimplementasikan oleh masing-masing daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adanya standarisasi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dapat menjawab tantangan dan mengatasi hambatan dalam pemerataan layanan pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan telah memiliki kriteria dan tolok ukur yang jelas, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya, bahkan tahap demi tahap dapat dievaluasi hasil-hasilnya sebagai dasar kebijakan selanjutnya.

Standar nasional pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat tentu sudah diimplementasikan. Salah satu contoh implementasinya adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan seperti yang ditetapkan dalam standar isi. Begitu pula dengan standar

kompetensi lulusan, standar proses dan standar lainnya sampai pada standar penilaian pendidikan.

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sampai tahun 2013 ini belum pernah ada studi evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Padahal hasil studi evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian standarisasi layanan pendidikan dan standar layanan pendidikan sebagai syarat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Disamping itu hasil evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam pengambilan kebijakan dan penentuan skala prioritas pembangunan di bidang pendidikan khususnya pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Fenomena yang terjadi selama ini adalah bahwa kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah, direncanakan tanpa didasari atas hasil evaluasi ketercapaian pembangunan sebelumnya, terutama hasil evaluasi yang mendiskripsikan sejauhmana tingkat pencapaian dalam implementasi standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan dan mutu pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, terutama pada SMA.

Latar belakang dan fenomena di atas tentu saja merupakan sebuah permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian yang berfokus pada penelitian evaluasi dan hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat jika dipakai sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada SMA di

Kabupaten Kotawaringin Barat, dan judul yang dianggap tepat untuk memenuhi kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan tersebut adalah :

Studi Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Perumusan Masalah

1. Sejauhmana pencapaian Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. SMA mana saja di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah mencapai Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan SMA mana saja di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah mencapai Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berfokus pada studi evaluasi ini diharapkan memiliki kegunaan atau manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya studi kebijakan publik bidang pendidikan.
- b. Hasil penelitian diharapkan sebagai wacana perubahan di bidang pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran yang kongkret mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya untuk dasar perencanaan pembangunan bidang pendidikan menengah, terutama perencanaan pembangunan SMA.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan pencapaian Standar Nasional Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendidikan.

Pendidikan tidak terlepas dari peran manusia yang berusaha masuk dalam kehidupan yang layak dalam dunia ini. Perkembangan peradaban manusia sebagai bukti adanya proses pendidikan, baik secara disadari melalui proses terencana maupun tidak melalui pengalaman dalam kehidupan. Pernyataan ini merupakan konsep empirik, karena sebagian besar kita rasakan dalam kehidupan.

Beberapa konsep pendidikan perlu dikemukakan dibawah ini yang diambil dari: <http://nie07independent.wordpress.com/konsep-pendidikan-2/#comment-1319> pada tanggal 14 Maret 2013 pukul 13.30 WIB. Diantara konsep-konsep tersebut adalah : Branata (1988) mengungkapkan bahwa:

“Pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun secara tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan”.

Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Purwanto (1987 :11) yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat”

Kleis (1974) memberikan batasan umum bahwa:

pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena ada

interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya.

Idris (1982:10) mengemukakan bahwa : Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik yang secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya, dalam arti supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, agar menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Potensi disini ialah potensi fisik, emosi, sosial, sikap, moral, pengetahuan, dan keterampilan.

Konsep pendidikan seperti dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditegaskan bahwa pendidikan itu bukan hanya sebagai usaha terencana saja, tetapi interaksi dalam kehidupan juga merupakan pendidikan dari pengalaman. Disisi lain dapat dikatakan bahwa proses pendidikan yang terencana memiliki nilai proses yang baik dalam pengembangan hasil pendidikan itu sendiri, sehingga perjalanan pengembangan pendidikan tidak terlepas dari perencanaan pendidikan untuk mengikuti perkembangan zaman.

2. Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Ayat (2) berbunyi :

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.”

Ayat (3) berbunyi:

”Sistem Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”

3. Kebijakan Publik.

Kebijakan publik menurut Winarno dalam Muhammad Munadi dan Bernawi (2011:17) menyatakan bahwa:

“Kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah.”

Konsep ini menekankan pada subyektifitas dan pertanggungjawaban dalam membuat kebijakan publik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa konsep demikian menunjukkan pertimbangan dalam menentukan

kebijakan publik yang mengisyaratkan bahwa kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah. Aktor-aktor di luar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya serta faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.

Konsep diatas menunjukkan demikian pentingnya sebuah kebijakan maka proses pembuatan kebijakan menggunakan pertimbangan, mulai dari perencanaan kebijakan, tahap pembuatan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan sampai kepada evaluasi kebijakan, bahkan jika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya perbaikan, maka dapat dilakukan perbaikan. Tahap terakhir ini merupakan dinamisasi dari sebuah kebijakan publik.

Pengertian yang berbeda dikemukakan oleh Dye dalam Muhammad Munadi dan Bernawi (2011:17) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do.*" Maksudnya adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Fokus pendapat ini adalah kebijakan tidak hanya rumusan kebijakan di atas kertas saja, tetapi pilihan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, baik dilakukan maupun tidak dilakukan tanpa dipengaruhi oleh pihak non pemerintah.

4. Kebijakan Publik Bidang Pendidikan.

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah merupakan kebijakan publik yang berlaku di Indonesia.

Nugroho dalam Muhammad Munadi dan Bernawi (2011:18) berpendapat bahwa:

Kebijakan pendidikan dilihat dari empat kuadran yaitu pemerintah dengan masyarakat, masyarakat, pemerintah, tanpa pemerintah termasuk kuadran I yaitu pemerintah dengan masyarakat, sehingga diperlukan partisipasi aktif sektor di luar pemerintah. Argumentasi yang bisa dibangun bahwa pendidikan sebenarnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pemerintah menganggap bahwa pendidikan merupakan kegiatan strategis bagi perkembangan sebuah negara karena penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada tingkat pendidikan yang dicapai penduduknya. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lepas tangan. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah meliputi perencanaan, pembuatan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi kebijakannya.

Selanjutnya Munadi dan Bernawi (2011:19) berpendapat bahwa :

Kebijakan publik bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik

bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) berbunyi :

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Konsep di atas merupakan alasan penting adanya sebuah kebijakan publik di bidang pendidikan sebagaimana berlaku sekarang.

Dari beberapa konsep dan uraian di atas dalam konteksnya di Indonesia dapat didefinisikan bahwa kebijakan publik bidang pendidikan adalah keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan yang berbentuk Undang-undang atau perda merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan masyarakat yang diwakili DPR/DPRD, sedangkan kebijakan yang berbentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri merupakan

keputusan pemerintah sendiri yang pada hakikatnya juga atas dasar aspirasi masyarakat yang diamanatkan melalui undang-undang, sehingga hakikat dari peraturan pemerintah atau peraturan menteri tersebut merupakan kebijakan operasional dari kebijakan publik secara keseluruhan.

Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, standarisasi pendidikan, rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan dan lain sebagainya menyangkut penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam kebijakan, termasuk standarisasi dari semua komponen pendidikan itu sendiri sehingga bisa disebut standarisasi nasional pendidikan yang ada di Indonesia.

5. Standarisasi Pendidikan Nasional.

Sebagai salah satu pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut menjadi bahan acuan formal bagi setiap warga negara Republik Indonesia, khususnya bagi pihak yang menangani pendidikan di Indonesia, apapun skala dan lingkupnya harus menyadari betul komitmen konstitusional ini.

Standarisasi Pendidikan Nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 ayat

1 menyebutkan bahwa :

“Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas dapat di maknai bahwa sistem pendidikan nasional telah memiliki standarisasi dengan kriteria minimal, artinya bahwa paling tidak setiap penyelenggara pendidikan di Indonesia harus memenuhi kriteria-kriteria minimal yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut.

Oleh karena itu standarisasi pendidikan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut perlu disosialisasikan, diimplementasikan serta perlu dievaluasi ketercapaian dalam pelaksanaannya.

6. Evaluasi Kebijakan Publik Bidang Pendidikan.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini mengarah kepada penelitian formatif mengingat penelitian ini secara umum merupakan penelitian evaluasi kebijakan publik bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian program standarisasi pendidikan.

Soeprapto (2000:112) yang menyatakan bahwa “keseluruhan tujuan penelitian formatif adalah untuk memudahkan pengembangan program”.

Pengembangan program dalam penelitian ini adalah program pencapaian Standar Nasional Pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada

peningkatan mutu pendidikan. Posisi ini diambil dengan asumsi bahwa program standarisasi pendidikan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 merupakan program baku yang masuk dalam turunan sistem pendidikan nasional.

Konsep lain yang menjadi dasar utama penelitian ini adalah konsep evaluasi program sebagaimana Soeprapto (2000:1) menyatakan bahwa:

Penelitian evaluasi adalah suatu bidang yang efektif dari aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan, penganalisisan dan penafsiran informasi untuk kebutuhan implementasi dan usaha-usaha intervensi untuk kehidupan manusia yang lebih baik. (hal 1)

Evaluasi program mengacu pada penggunaan metode penelitian untuk mengukur keefektifan pelaksanaan program-program. Keefektifan merupakan tingkat di mana suatu program mencapai tujuannya atau memproduksi efek-efek tertentu. (hal. 3)

Riduwan (2010:53) menyatakan bahwa: Penelitian evaluasi dapat dinyatakan juga sebagai evaluasi, tetapi dalam hal lain juga dapat dinyatakan sebagai penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena.

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat sebelumnya

tidak ada penjelasan dan hasil pencapaiannya, padahal sebagai sebuah program standarisasi pendidikan hasil ketercapaian pelaksanaan tersebut menjadi penting. Sebagai sebuah program standarisasi melalui peraturan perundang-undangan tentu pasal demi pasal dapat dijadikan indikator sebagai parameter ketercapaian. Indikator-indikator tersebut dapat dibuat menjadi sebuah angket sebagai instrumen penelitian sebagaimana merujuk kepada Arikunto (2007:101) yang berpendapat bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendiskripsikan tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan, maka data yang diperoleh jika menggunakan angket dapat dianalisis dengan statistik non parametrik yang tidak menguji parameter populasi sebagaimana Riduwan (2007:107) mengatakan bahwa :

Statistika non parametrik yang tidak menguji parameter populasi, tetapi yang akan diuji adalah distribusi, dan menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.

Pendapat di atas sejalan pula dengan pendapat Siregar (2013:3) :

Statistik Non Parametrik adalah bagian statistik yang parameter populasi atau datanya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan (*free distribution prosedures*) dan variannya tidak perlu homogen. Statistik non parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal.

Maksud pendapat di atas adalah bahwa analisis data berdasarkan data nominal yaitu data yang tercatat saja, atau berdasarkan data ordinal yaitu data yang menyatakan urutan bagi sebuah unsur dalam kumpulan.

Data nominal dan ordinal hasil penelitian akan menjadi data hasil penelitian yang dianalisis, sehingga dapat menjelaskan kriteria tingkat ketercapaian yang dapat dideskripsikan.

Dari beberapa konsep di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia sehingga pendidikan nasional di Indonesia perlu dilakukan kebijakan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan publik bidang pendidikan adalah standarisasi pendidikan nasional. Standarisasi pendidikan nasional ini merupakan bentuk dari kebijakan publik bidang pendidikan yang harus dituangkan dalam program-program pemerintah dalam bidang pendidikan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program pemerintah tersebut perlu dievaluasi pelaksanaannya untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaiannya. Sedangkan tingkat ketercapaian akan ditetapkan berdasarkan konsep Arikunto (2007:271) yang memberikan alternatif penilaian 5 katagori/ peringkat, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang.

Konsep-konsep evaluasi kebijakan publik di atas akan dipakai sebagai rangkaian konsep penelitian evaluasi agar dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang tersebut dalam permasalahan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

B. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

Penelitian terdahulu yang relevan sangat sulit ditemukan dan inilah salah satu alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Meskipun demikian, peneliti terus akan mencari hasil penelitian terdahulu sebagai pembanding dan akan diakomodir dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan-Temuan
1.	Suharmi	Implementasi Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan. (Studi Kasus di SMA Surakarta)	SMA Negeri-1 Surakarta sebagai sekolah percontohan dari pelaksanaan Permendiknas No. 22 tahun 2006 dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan, melaksanakan otonomi pendidikan, desentralisasi pendidikan daerah, deversifikasi kurikulum dalam dunia pendidikan yang ditentukan oleh

			<p>pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh SMAN-1 surakarta dalam pelaksanaan KTSP adalah mengadakan komunikasi dengan dinas terkait, kerjasama dengan komite sekolah.</p> <p>Dalam pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, pemerintah kurang memperhatikan pada SMA Swasta, sehingga terjadi kesenjangan antara SMA Negeri dan SMA Swasta.</p>
2.	Srianik	<p>Efektivitas Standar Pendidikan Anak Usia Dini Jalur</p>	<p>Standar Tingkat pencapaian Perkembangan, Standar Pendidik dan</p>

		Pendidikan Nonformal. (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini) Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.	Tenaga Kependidikan, Standar Isi,Proses dan Penilaian, Standar Sarana Prasarana pada Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung telah berjalan efektif Upaya meningkatkan efektivitas Standar PAUD sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal yang meliputi pembinaan,koordinasi lintas sektoral dan sosialisasi program PAUD di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung berjalan efektif.
--	--	---	--

Sebagaimana judul penelitian dan temuan-temuan yang dipaparkan pada penelitian terdahulu dalam tabel di atas, jika dibandingkan dengan judul serta permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dipastikan bahwa penelitian ini memiliki relevansi terhadap penelitian terdahulu seperti 2 penelitian di atas, karena sama-sama meneliti tentang kebijakan publik dibidang pendidikan. Perbedaannya adalah pada judul penelitian. Perbedaan judul penelitian tersebut tentu dapat dipastikan mengakibatkan perbedaan latar belakang, perumusan masalah, metodologi penelitian, temuan dan pembahasan dan kesimpulan. Penelitian ini mengambil posisi pada evaluasi ketercapaian standar nasional pendidikan yang terdiri 8 standar dengan lokus pada 12 SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan 2 penelitian terdahulu hanya mengkaji salah satu standar pendidikan. Suharmi posisinya mengkaji implementasi pada 1 standar yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi yang merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan dengan lokus penelitian pada SMA di kota surakarta.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Srianik adalah tentang efektivitas standar pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dengan lokus pada kabupaten Tulungagung.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini posisinya berbeda dengan penelitian terdahulu yang relevan seperti

tersebut di atas tetapi memiliki ada relevansinya, yaitu pada kajian kebijakan publik di bidang pendidikan.

C. Kerangka Berpikir.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan faktor utama penentu keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat dan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana pada pasal 31.

Pendidikan di Indonesia dalam prepektif masa depan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyebutkan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, keserdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.”

Pendidikan adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti, sehingga agar proses itu berjalan dengan baik maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan di daerahnya sesuai dengan semangat otonomi daerah, terutama kebijakan anggaran

pendidikan yang dirumuskan melalui pengaturan, pengorganisasian dan tindakan-tindakan agar kebijakan publik di bidang pendidikan yang harus dilaksanakan di daerah terlaksana dengan baik, sehingga percepatan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

Salah satu kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional adalah kebijakan standarisasi pendidikan nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang sudah berjalan selama 7 tahun ini belum ada hasil evaluasi secara khusus yang menghasilkan seberapa jauh tingkat pencapaian standar nasional pendidikan di Indonesia, di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/ kotamadya, bahkan di masing-masing sekolah di kabupaten/ kotamadya. Padahal hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya, terutama kebijakan anggaran pendidikan bagi pusat dan daerah, bagi sekolah untuk dasar pengelolaan manajemen sekolah, sebagaimana Soeprpto, M.S.

(2000:3) yang mengatakan bahwa :

“salah satu tujuan evaluasi adalah untuk memenuhi syarat-syarat kelompok pembiayaan yang memiliki tanggung jawab fiskal untuk alokasi dana.”

Variabel tingkat ketercapaian standar nasional pendidikan adalah kebijakan pengelolaan pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang ada di sekolah khususnya SMA, sehingga penelitian lebih

difokuskan pada 9 SMA Negeri dan 3 SMA Swasta di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebagaimana daftar SMA per kecamatan pada tabel 2.2 di bawah ini:

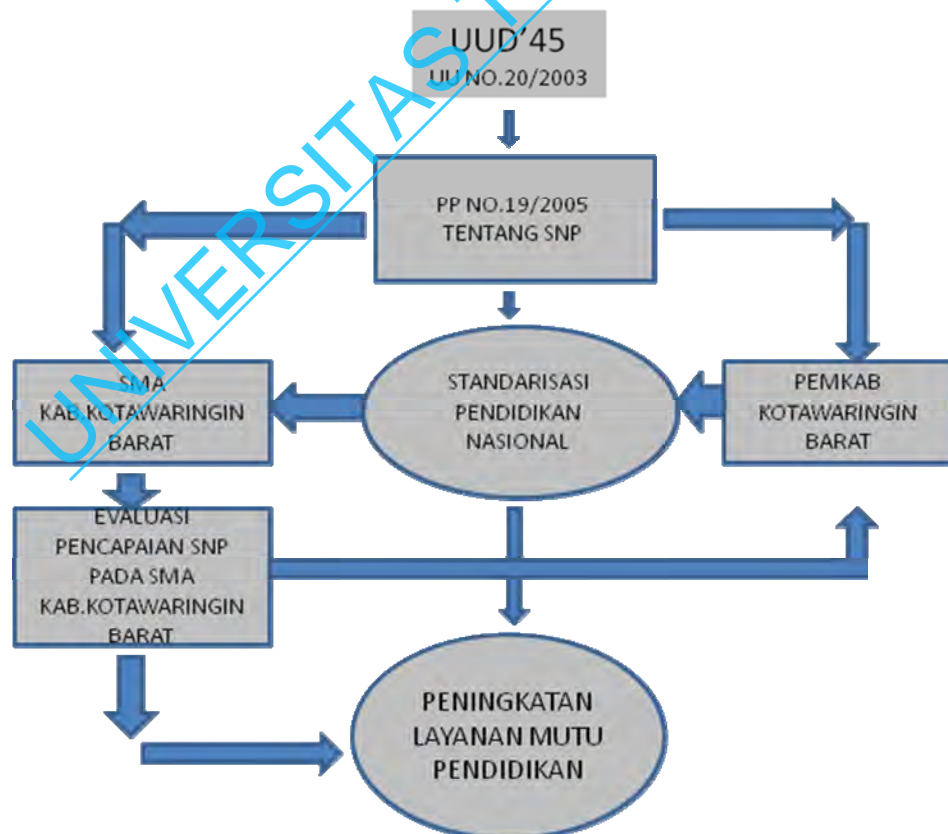
Tabel 2.2
Jumlah SMA Kabupaten Kotawaringin Barat

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	
1.	Arut Selatan	1.	SMAN-1 Pangkalan Bun
		2.	SMAN-2 Pangkalan Bun
		3.	SMAN-3 Pangkalan Bun
		4.	SMA PGRI -1 Pangkalan Bun
		5.	SMA Abdi Pangkalan Bun
2.	Kumai	6.	SMAN-1 Kumai
		7.	SMAN-2 Kumai
3.	Kotawaringin lama	8.	SMAN-1 Kotawaringin Lama
4.	Pangkalan Lada	9.	SMAN-1 Pangkalan Lada
5.	Pangkalan Banteng	10.	SMAN-1 Pangkalan banteng
		11.	SMA PGRI-5 Prusus P.Banteng
6.	Arut Utara	12.	SMAN-1 Arut Utara

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 12 SMA Negeri/ Swasta, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat sebagai bahan perencanaan dan pertimbangan serta kebijakan selanjutnya, karena penelitian ini akan menghasilkan tingkat pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan di 12 SMA yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang

secara jelas dapat diketahui tingkat rata-rata pencapaian, SMA mana saja yang memiliki tingkat pencapaian dengan kriteria memenuhi standar, belum memenuhi standar, kurang memenuhi standar, tidak memenuhi standar sampai pada sangat tidak memenuhi standar nasional pendidikan. Dengan demikian maka hasil penelitian adalah data tingkat pencapaian standar nasional pendidikan yang bermanfaat untuk dasar perencanaan, kegiatan, dan kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan, khususnya pendidikan menengah, terutama SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk memperjelas deskripsi kerangka berpikir, maka digambarkan seperti bagan gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir

D. Defenisi Operasional

Penelitian ini berjudul Studi Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari judul diatas dapat diuraikan defenisi operasional sebagai berikut :

1. Standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan standarisasi adalah penyesuaian bentuk dengan pedoman (standar) yang telah ditetapkan.
2. Standarisasi adalah penyesuaian bentuk dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Pendidikan Nasional berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (2) adalah pendidikan yang berdasarkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar perubahan zaman.
4. Standar Nasional Pendidikan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (17) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Evaluasi adalah suatu kegiatan pengukuran atau penilaian dari keefektifan atau tingkat pencapaian pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program selanjutnya.
6. Pencapaian adalah usaha-usaha pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan untuk memenuhi ketentuan atau kriteria (standar).

7. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah satuan layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum.
8. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah daerah administratif tingkat kabupaten yang termasuk wilayah provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat obyek dan soyek penelitian.
9. Defenisi operasional 8 Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 :

a. Standar Isi

Pasal 5 ayat (1) :

“Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu”.

Pasal 5 ayat (2):

“Standar isi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik”.

b. Standar Proses

Pasal 19 ayat (1) :

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 25 ayat (1) :

“Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan”.

Pasal 25 ayat (2) :

“Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah”.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28 ayat (1) :

“Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Pasal 28 ayat (2) :

“Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 42 ayat (1) :

“Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.

Pasal 42 ayat (2) :

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f. Standar Pengelolaan

Pasal 49 ayat (1) :

“Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.

Pasal 50 ayat (1) :

“Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan”.

Pasal 50 ayat (3) :

“Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan”.

g. Standar Pembiayaan

Pasal 62 ayat (1):

“Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal”.

Pasal 62 ayat (2):

“Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap”.

Pasal 62 ayat (3):

“Biaya personal sebagaimana dimaksud meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan”.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 63 ayat (1):

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Pasal 64 ayat (1):

“Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas”.

Pasal 64 ayat (2):

“Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran”.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, bahwa penelitian ini ingin mendeskripsikan tentang tingkat pencapaian program Standar Nasional Pendidikan yang dilaksanakan pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak mengambil kajian menilai efektivitas dari program tersebut, tetapi hanya menilai sejauhmana program itu dilaksanakan, sehingga desain yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penetapan desain ini sebagaimana Arikunto (2007:234) menyatakan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dikatakan pula bahwa penelitian evaluasi dikenal sebagai penelitian program.

Moicong (2009) juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku atau tindakan secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendapat di atas digunakan untuk menjadi dasar bahwa, meskipun penelitian ini menggunakan angka dan skala dalam menganalisis data,

bukan berarti penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi menggunakan pendekatan kualitatif. Angka dan skala dalam penelitian ini merupakan data nominal atau ordinal dan dapat dikatakan sebagai data permulaan untuk menentukan deskripsi hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sekolah yang dimaksud adalah SMA Negeri sebanyak 9 Sekolah, SMA Swasta sebanyak 3 Sekolah. Sehingga populasi berjumlah 12 sekolah.

3. Parameter Dalam Penelitian

Standarisasi Nasional Pendidikan mengkapur 8 Standar, dimana masing-masing standar memiliki indikator-indikator ketercapaiannya, sehingga indikator tersebut dipakai sebagai parameter ketercapaian standar.

Jumlah indikator masing-masing standar adalah Standar Isi berjumlah 38 indikator, Standar Kompetensi Lulusan berjumlah 8 indikator, Standar Proses berjumlah 23 indikator, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berjumlah 28 indikator, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan berjumlah 146 indikator, Standar Pengelolaan Pendidikan berjumlah 88 indikator, Standar Pembiayaan berjumlah 17 indikator dan Standar Penilaian Pendidikan berjumlah 40 indikator.

Mengingat jumlah indikator-indikator ini cukup banyak dan terinci dalam tabel kurang lebih 23 halaman, maka rincian indikator sebagai parameter ketercapaian Standar Nasional Pendidikan ditampilkan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 halaman 124.

B. Instrumen Penelitian.

1. Angket

Agar indikator-indikator dari 8 standar nasional pendidikan dapat diketahui ketercapaiannya, maka peneliti membuat angket dengan mendesain indikator-indikator masing-masing standar tersebut menjadi pertanyaan dengan 2 alternatif jawaban yaitu jawaban YA, jika indikator terlaksana atau tercapai, dan jawaban TIDAK jika indikator tidak terlaksana/ tidak tercapai.

Pemilahan dan urutan pertanyaan dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdapat dalam angket diurutkan berdasarkan kedekatan struktur materi dengan tidak bermaksud memutarbalikan teks sebuah peraturan dan nomor pertanyaan berurutan dengan pemilahan nomor sebagai berikut :

- standar isi, nomor 1-17, jumlah indikator 38;
- standar kompetensi lulusan, nomor 18-22, jumlah indikator 8;
- standar proses, nomor 23-44, jumlah indikator 23;
- standar pendidik dan tenaga kependidikan, nomor 45-57, jumlah indikator 28;
- standar sarana prasarana, nomor 58-130, jumlah indikator 146;

- standar pengelolaan, nomor 131-162, jumlah indikator 88;
- standar pembiayaan, nomor 163-170, jumlah indikator 17 dan
- standar penilaian pendidikan, nomor 171-191, jumlah indikator 40.

Angket terdapat pada lampiran 2 halaman 147.

2. Dokumentasi

Instrumen penelitian lain yang dipakai adalah dokumentasi dalam hal ini dokumen profil sekolah. Baik yang terdapat di sekolah, maupun yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai institusi pembina. Dokumen ini berfungsi sebagai alat validasi data yang didapat dari angket disamping verifikasi lapangan jika data yang didapat dari angket dan dokumen profil sekolah diragukan validitasnya.

C. Responden Dalam Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pelaksana kebijakan yang paling operasional di tingkat sekolah yang terdiri dari 9 SMA Negeri dan 3 SMA Swasta.

Para responden tersebut adalah :

1. Dra. Rusnah (Kepala SMA Negeri-1 Pangkalan Bun)
2. Khairil Anwar, S.Pd. (Kepala SMA Negeri-2 Pangkalan Bun).
3. Dra. Sunarsih. (Kepala SMA Negeri-3 Pangkalan Bun)
4. Drs. Muni Suriansyah. (Kepala SMA Negeri-1 Kumai)

5. Ahmad Faujan, S.Pd. (Kepala SMA Negeri-2 Kumai)
6. Drs. Gusti Suriansyah. (Kepala SMA Negeri-1 Kotawaringin Lama)
7. Suwarno, S.Pd, M.Pd (Kepala SMA Negeri-1 Pangkalan Lada)
8. Said Idrus, S,Pd (Kepala SMA Negeri-1 Pangkalan Banteng)
9. Drs. Matius (Kepala SMA Negeri-1 Arut Utara)
10. Dra. Wajib Tati (Kepala SMA ABDI Pangkalan Bun)
11. Eyudia Somu, S.Pd (Kepala SMA PGRI-1 Pangkalan Bun)
12. Sutopo, S.Pd (Kepala SMA PGRI-5 Pirsus Pangkalan Banteng)

Ke 12 orang responden ini menjadi *key informan* karena mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen sekolah.

D. Prosedur Pengumpulan Data.

1. Penyebaran Angket.

Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket kepada responden. Tugas responden adalah menjawab pertanyaan – pertanyaan dalam angket yang telah diterima masing-masing berdasarkan kondisi dan data riil yang ada di sekolah yang mereka pimpin. Untuk meminimalisir kekeliruan dalam pengisian angket, Kepala Sekolah sebagai responden dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Kesiswaan, Sarana/ Prasarana dan Hubungan Masyarakat. Meskipun demikian validitas jawaban dalam angket menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah selaku responden, sehingga setiap angket yang telah dijawab harus dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

2. Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi yang dimaksud adalah mempelajari data dan informasi yang ada dalam dokumen profil sekolah dan dokumen data sekolah yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat. Prosedur ini ditempuh untuk menjamin validitas data jika data yang didapat dari angket dipandang masih perlu divalidasi.

3. Verifikasi Lapangan.

Verifikasi lapangan adalah pilihan cara yang akan dilakukan dalam prosedur pengumpulan data jika data hasil angket dan hasil studi dokumentasi masih diragukan tingkat validitasnya.

E. Metode Analisis Data.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dan metode analisis data adalah dengan statistika non parametrik yang tidak menguji parameter populasi, tetapi yang akan diuji adalah distribusi dengan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terkait dengan adanya distribusi normal atau tidak normal.

Data yang dipakai adalah data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang tercatat saja yang dalam penelitian ini menunjukkan jumlah sekolah, jumlah indikator atau data mentah hasil penelitian. Sedangkan data ordinal yaitu data yang menyatakan urutan bagi sebuah unsur dalam kumpulan yang dalam penelitian ini akan berfungsi

menjelaskan urutan pencapaian standar dalam bentuk angka persentase pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Metode analisis data dalam pembahasan dilakukan dengan cara mentabulasikan data dari angket kedalam tabel rekapitulasi hasil angket yang berisi nomor urut, nama sekolah, jumlah jawaban ya dan tidak pada masing-masing kolom standar dan jumlah jawaban ya dan tidak pada masing-masing standar pada masing-masing sekolah.

Data hasil tabulasi yang tertuang dalam tabel rekapitulasi hasil angket tersebut kemudian diubah dalam bentuk angka persentase dengan rumus :

$$PKS = JKIS / JIS \times 100$$

Dimana : PKS : Persentase Ketercapaian Standar

JKIS :Jumlah Ketercapaian Indikator Standar (jumlah jawaban YA atau jawaban TIDAK).

JIS : Jumlah Indikator Masing-Masing Standar.

Aplikasi rumus ini dicontohkan sebagai berikut :

Jumlah indikator (jumlah pertanyaan) pada standar isi adalah 38 pertanyaan. Jika jawaban YA berjumlah 34, maka jawaban TIDAK berarti 4, maka persentase ketercapaian standar isi adalah : $34/38 \times 100 = 89\%$. Sedangkan yang tidak tercapai adalah : $4/38 \times 100 = 11\%$.

Dalam penelitian ini, parameter penilaian menggunakan kriteria ketercapaian standar hasil evaluasi yaitu skala tingkat ketercapaian yang ditunjukkan oleh tingkat ketercapaian berdasarkan rentang persentase angka ketercapaian seperti tabel berikut

Tabel 3.1
Kategori Peringkat Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan

Tingkat Ketercapaian SNP	Skor Ketercapaian Indikator SNP (dalam %)
Sangat Baik	87-100
Baik	75-86
Cukup	62-74
Kurang	50-61
Sangat Kurang	≤ 49

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk daerah yang memiliki sejarah tersendiri. Mulai dari sebuah kerajaan Kotawaringin sampai sejarah pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menyusuri jejak-jejak sejarah Kerajaan Kotawaringin, terlebih dahulu harus mengetahui Kerajaan Banjar. Karena keturunan Raja Banjarlah yang mula pertama membangun Kerajaan Kotawaringin. Dengan kata lain bahwa Daerah Kerajaan Kotawaringin adalah di bawah kekuasaan Banjar pada mulanya. Sultan Musta'inubillah Raja Kerajaan Banjar berputera empat orang dan seorang putri masing-masing bernama:

1. Pangeran Adipati Tuha, Dialah yang menjadi Raja di Kerajaan Banjar bergelar Sultan Inayatullah.
2. Pangeran Adipati Anom
3. Pangeran Antasari (Pahlawan Nasional)
4. Pangeran Adipati Antakusuma
5. Putri Ratu Ayu

Karena masing-masing putra mahkota berminat untuk menjadi sultan memegang tampuk pimpinan kerajaan, membuat sang ayah

harus berpikir bijaksana. Putra mahkota yang berminat untuk menjadi sultan, sedangkan dia bukan seorang putra tertua, maka diputuskan agar mencari wilayah baru untuk mendirikan kerajaan sendiri. Pangeran Adipati Antakusuma yang memiliki keberanian dan semangat yang tinggi untuk menjadi seorang pimpinan, telah bertekad untuk pergi meninggalkan Kerajaan Banjar dengan tujuan ke arah barat untuk mencari tempat dimana akan didirikan kerajaan baru. Dengan restu Ramanda dan Ibunda serta pejabat-pejabat Kerajaan Banjar, Pangeran Adipati Antakusuma beserta sejumlah pengawal dan beberapa perangkat peralatan kerajaan dengan perahu layar bertolak menuju arah barat. Dalam perjalanan banyak tempat yang disinggahi antara lain Teluk Sebangau, Pagatan Mendawai, Sampit, dan Pembuang. Dirwayatkan bahwa tempat-tempat yang disinggahi mempunyai cerita sendiri. Pada saat singgah di Teluk Sebangau, setelah beberapa hari berada disitu, terasa masih terlalu dekat, seakan masih terdengar hiruk pikuk Kerajaan Banjar atau menurut bahasa Banjar Ingauan Banjar masih kedengaran, sehingga akhirnya diputuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan akhirnya tempat tersebut disebut Sebangau.

Dalam perjalanan selanjutnya bahtera Pangeran Adipati singgah di Pagatan Mendawai. Di tempat inipun Pangeran Adipati dan rombongan merasa kurang yakin akan kondisi alam sekitarnya untuk dijadikan tempat untuk mendirikan kerajaan. Karena merasa kurang yakin (dalam bahasa Banjar Hawaii) maka daerah ini diberi

nama Mendawai. Begitu pula saat singgah di muara Sungai Sampit, karena dengan terasa sempit dan tidak cocok untuk mendirikan kerajaan, maka ditinggalkan lagi dan akhirnya tempat tersebut diberi nama Sampit. Bahtera Panggeran Adipati berlayar terus meninggalkan arah barat dan akhirnya singgah di Kuala Pembuang. Pada saat itu ada masyarakat di sana, tetapi kehadiran Pangeran Adipati Antakuskuma dan rombongan bermaksud untuk mendirikan kerajaan baru ditolak oleh masyarakat disana, karena mereka masih suka dipimpin oleh Kerajaan Banjar. Dengan semangat tinggi tanpa putus asa rombongan berusaha melanjutkan perjalanan, kali ini tidak lagi menyusuri pantai, tetapi menuju ke hulu sungai yang akhirnya tiba di suatu desa yang bernama Desa Pandau. Masyarakat Suku Dayak yang sudah lama berada di Desa Pandau berada di bawah kepemimpinan demang Petinggi di Umpang akhirnya menerima kehadiran rombongan Pangeran Adipati Antakusuma. Demang Petinggi sebagai Kepala Suku Dayak, Anom menyerukan kepada rakyatnya agar menerima rombongan Pangeran Adipati Antakusuma ini yang mana akan dijadikan raja dari rakyat Dayak dengan syarat raja harus memperlakukan kita bukan sebagai hamba, tetapi sebagai pembantu utama dan kawan yang terdekat atau sebagai saudara yang baik. Rakyat tidak akan menyembah sujud dihadapan Pangeran Adipati Antakusuma. Usulan ditimbang dan diterima baik oleh Pangeran dan seluruh rombongannya.

Dari pihak Suku Dayak Arut, mengusulkan agar perjanjian ini bukan sekedar di bibir saja, melainkan harus bermaterai darah manusia yang diambil seorang dari Suku Dayak Arut dan seorang dari Pangeran Adipati Antakusuma. Sukar diterima oleh pikiran manusia hanya untuk sebuah janji saja, tetapi karena adat mendesak, maka masing-masing menarik salah seorang diantara kedua rombongan untuk dijadikan korban perjanjian. Kedua calon korban ini tidak pernah menyangkal, malahan mereka merasa bangga karena terpilih sebagai korban. Mereka menganggap kesatria dan pahlawan bangsa. Dengan rela mereka dijadikan korban perjanjian setia antara kedua suku yang saling mengikat rasa kekeluargaan. Sebelum kedua calon korban ini berdiri siap untuk dikorbankan, mereka mengadopsi sebuah batu yang harus ditancapkan ke tanah sebagai bukti turun temurun saksi sepanjang masa. Dengan melakukan upacara adat yang hidmat kedua calon korban berdiri di samping batu saksi, yang sekarang terkenal dengan nama "BATU BETAHAN" di Pandau daerah Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Calon korban dari pihak Suku Dayak berdiri menghadap ke hulu asal datangnya dan seorang calon korban dari rombongan Pangeran Adipati Antakusuma berdiri menghadap hilir menunjukkan asal kedatangannya. Dengan sikap satria, kedua calon korban ini menunggu saat akhir hidupnya dengan sabar menanti sampai selesai upacara perjanjian antara kedua belah pihak. Setelah selesai

upacara sumpah setia, Kepala Suku Dayak Arut mencabut mandaunya dan ditusukkan menembus ke dada korbannya dan darahpun mengucur deras. Korban dari rombongan Pangeran ditusuk pula sehingga kedua darah korban ini memancur bersilang dan menetes jatuh menjadi satu membasahi tanah. Percampuran darah secara langsung dan disaksikan seluruh rakyat kedua belah pihak inilah yang dimaksud untuk mempersatukan segala rasa dan pikiran dalam segala rencana bersama. Perjanjian ini selanjutnya dinamai “PANTI DARAH JANJI SAMAYA” yang berarti perjanjian yang dikokohkan dengan tetesan darah yang menjadi satu. Kasultanan Kutaringin yang diperintah oleh Pangeran Adipati Anta Kusuma sejak 1679, dalam masa pemerintahannya Pangeran Adipati Antakusuma mengangkat Kyai Gede menjadi Perdana Menteri Kerajaan Kotawaringin. Untuk Pertama kalinya Keraton Kesultanan dibangun di Kotawaringin Lama dengan nama Astana Alnusari selanjutnya pada tahun 1814 Keraton Kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan yang disebut dengan Keraton Kuning atau Indra Kencana.

Setelah Proklamasi kemerdekaan RI maka wilayah Kesultanan Kotawaringin menjadi bagian wilayah negara RI, dengan status Swapraja / Kwedanan dan selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat sebagai Daerah Otonom Pangkalan Bun sebagai ibu kota Kabupaten.

Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949 dengan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1949 lahirlah Kabupaten Kotawaringin dengan ibu kota Sampit dan dikepalai oleh Bupati Kepala Daerah yang pada waktu itu bernama TJILIK RIWUT. Sedangkan daerah Swapraja Kotawaringin Barat hanya setingkat dengan Kewedanan dengan ibu kota Pangkalan Bun yang termasuk dalam daerah kekuasaan Wedana / Wakil Kepala Daerah yang pada waktu itu bernama BASRI. Daerah Swapraja Kotawaringin terbagi atas beberapa kecamatan dan dikepalai oleh seorang camat (dahulu asisten Wedana atau Kyai). Kecamatan Arut Selatan, Ibu kotanya Pangkalan Bun. Kecamatan Kumai, Ibu kotanya Kumai. Kecamatan Sukamara, Ibu kotanya Sukamara. Kecamatan Bulik, Ibu kotanya Nanga Bulik. Lembaga legeslatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit, oleh karena daerah ini adalah merupakan sebagian dari daerah Kabupaten Kotawaringin maka untuk wakil-wakil rakyat dari daerah ini yang duduk di lembaga tersebut dilakukan pemilihan dan diambil oleh partai / organisai yang ada yaitu: M. Abdullah Mahmud dari Partai Masyumi, Ahmad Said dari BPRI, Dahlan Abbas dari Partai Masyumi, M. Sahloel dari PNI, Gusti M. Sanusi dari PNI, Djanuri dari SKI, Ismail dari PARKINDO.

Mengenai M. Sahloel karena sesuatu hal tidak dapat hadir sehingga akhirnya digantikan oleh Azhar Mukhtas. Kepala Daerah Swapraja Kotawaringin berturut-turut adalah:

1. Basri, BA
2. Gusti Ahmad
3. M. Saleh
4. Abdul Muis
5. Rojani
6. Syukur
7. C. Mihing (Bupati KDH Tingkat II Ketua Barat yang Ke-I)

Setelah berjalan beberapa tahun lamanya daerah ini berada di dalam lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat atas dasar kemauan rakyat yang disalurkan melalui partai-partai/ organisasi agar Daerah Swapraja Kotawaringin/ Kawedanan Pangkalan Bun memisahkan diri dari Kabupaten Kotawaringin dan penghapusan Swapraja menjadi suatu daerah kabupaten yang berdiri sendiri. Kemauan/ tuntutan ini melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRDS diperjuangkan dalam sidangnya yang pertama tahun 1955 dengan mengajukan suatu mosi tertanggal 21 Juni 1955 yang ditandatangani oleh Dahlan Abbas; M. Abdullah Mahmud; Azhar Mukhtas; Ahmad Said; Djainuri; dan Gusti M. Sanusi.

Mosi tersebut oleh sidang DPRDS dapat disetujui dan dikuatkan dengan keputusan DPRDS Kabupaten Kotawaringin yang

merupakan suatu resolusi tertanggal Sampit, 30 Juni 1955 yang disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur / Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Residen Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Bupati / Kepala Daerah Kotawaringin di Sampit

Dengan keputusan DPRDS Kabupaten Kotawaringin tersebut setelah sampai di Pemerintah Pusat, kemudian datanglah utusan dari Parlemen Pusat di Pangkalan Bun untuk meninjau atau melihat dari dekat keadaan daerah dan masyarakat, terutama tentang keinginan yang menjiwai mosi tersebut di atas apakah memang benar-benar datang dari masyarakat, oleh Pemerintah Pusat dikeluarkan UU No. 27 tahun 1959 tentang pembagian Daerah Tingkat II Kotawaringin menjadi dua daerah atas pembentukan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibu kota Sampit dan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibu kota Pangkalan Bun, yang pada waktu itu sudah berada dalam lingkungan daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Demikian asal-muasal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai dengan lainnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang diresmikan oleh Gubernur TJILIK RIWUT yang bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 1959 jam 09.15 di Balai Sembaga Mas Pangkalan Bun dalam suatu upacara resmi

dengan C. MIHING sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama dan sebagai aparat pemerintah yang ditugaskan guna menyambut lahirnya daerah ini menjadi Daerah Kabupaten Tk. II Kotawaringin Barat. Kabupaten Kotawaringin terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP.34/41/42 tanggal 28 Desember 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des.52/12/2-206 tentang pembagian kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan usianya yang menanjak dewasa itu wajarlah jika kabupaten ini memiliki tingkat kematangan. Sentuhan pembangunan selama PJP – I telah menjadikan daerah ini sejajar dengan daerah kabupaten lainnya baik pada level Kalimantan Tengah maupun level daerah lain di Kalimantan. Kabupaten Kotawaringin Barat setelah diadakannya pemekaran Kabupaten berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 saat ini memiliki luas wilayah sebesar 10.075.900 Km² atau sekitar 6,2 % luas provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 6 Kecamatan dan 72 desa dan 13 kelurahan. Kecamatan tersebut meliputi:

1. Kecamatan Arut Selatan
2. Kecamatan Kumai
3. Kecamatan Arut Utara
4. Kecamatan Kotawaringin Lama
5. Kecamatan Pangkalan Lada
6. Kecamatan Pangkalan Banteng.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota madya.

Secara geografis terletak diantara 3 kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan.

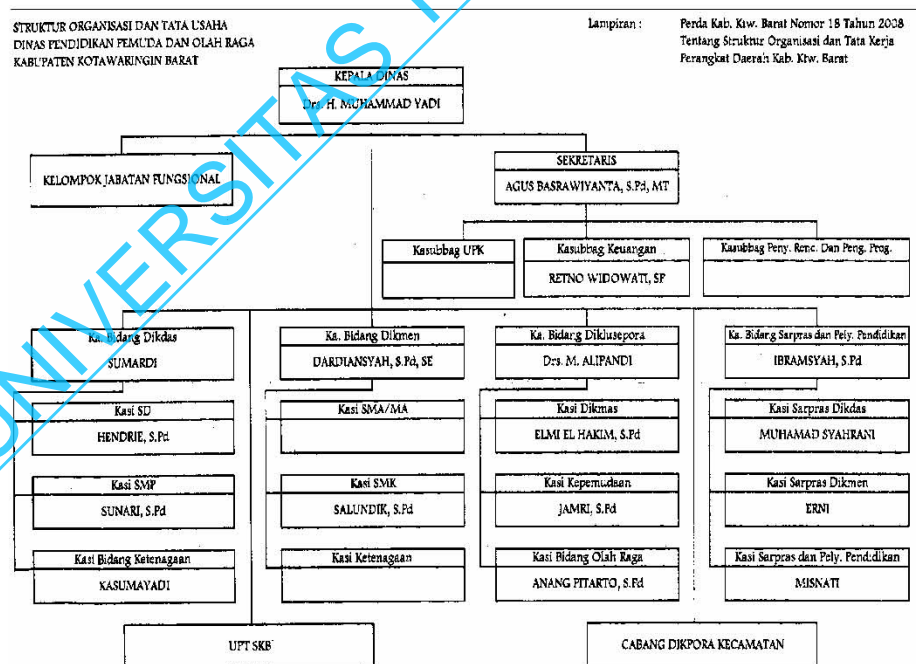
Jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 246.000 jiwa dengan luas wilayah 10.759 km² atau sama dengan 7,01 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari suku asli dan suku pendatang. Suku asli terdiri dari Suku Dayak Kotawaringin dan Suku Dayak Mendawai (Dayak Melayu). Sedangkan suku pendatang seperti halnya daerah lain yaitu hampir semua suku yang ada di Indonesia, tetapi di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih didominasi oleh suku Banjar dan suku Jawa. Bahasa sehari-hari adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia.

Secara astronomis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada 1°19' sampai dengan 3°36' Lintang Selatan dan 110°25' sampai dengan 112°50' Bujur Timur. Kabupaten Kotawaringin Barat beriklim tropis.

b. Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengurus bidang pendidikan, pemuda dan pendidikan olahraga. Kantor Dinas beralamat di Jalan Sutan Syahril Nomor 60 Pangkalan Bun.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana gambar 4.1 dibawah ini:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kotawaringin Barat

c. Gambaran Umum SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambaran umum SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai target populasi sekaligus sebagai subjek penelitian adalah :

1). SMA Negeri -1 Pangkalan Bun

SMA Negeri-1 Pangkalan Bun berdiri sejak tahun 1963 dan merupakan SMA yang pertama di Kabupaten Kotawaringin Barat. Terletak di pusat kota Pangkalan Bun yang beralamat di jalan Alipandi Sarjen nomor 44 Pangkalan Bun.

Secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri-1 Pangkalan Bun dijabat oleh Dra. Rusnah. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 7357 orang . Jumlah siswa sekarang 609 orang.

2). SMA Negeri-2 Pangkalan Bun.

SMA Negeri-2 Pangkalan Bun berdiri sejak tahun 1984. Terletak di pusat kota Pangkalan Bun yang beralamat di jalan Pasanah Nomor 15 Pangkalan Bun. Secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri-2 Pangkalan Bun dijabat oleh Krairil Anwar, S.Pd. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa

sebanyak 2593 orang lulusan. Jumlah siswa sekarang 680 orang.

3). SMA Negeri-3 Pangkalan Bun.

SMA Negeri-3 Pangkalan Bun berdiri sejak tahun 1999. Terletak di pusat kota Pangkalan Bun yang beralamat di jalan Cilik Riwut II Pangkalan Bun. Secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan. Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri-2 Pangkalan Bun dijabat oleh Dra. Sunarsih. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 1382 orang lulusan. Jumlah siswa sekarang tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 547 orang.

4). SMA Negeri-1 Kumai.

SMA Negeri-1 Kumai berdiri sejak tahun 1992. Terletak di Desa Sei. Kapitan Kecamatan Kumai. Alamat sekolah di jalan Padat Karya no. 1, Kumai. Jarak dari Ibukota kabupaten 15 Km.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri-1 Kumai dijabat oleh Drs. Muni Suriansyah. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 2519 orang lulusan. Jumlah siswa sekarang 538 orang.

5). SMA Negeri-2 Kumai.

SMA Negeri-2 Kumai yang semula SMA Swasta PGRI-4 Sungai Rangit berdiri sejak tahun 1984. Dinegerikan tahun 2005. Terletak di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai. Alamat sekolah jalan Ahmad yani Km 18 Desa Bumi Harjo Sungai Rangit. Jarak dari ibukota kabupaten 18 Km.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri-2 Kumai dijabat oleh Ahmad Faujan, S.Pd. Sejak dinegerikan sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 945 orang lulusan. Jumlah siswa sekarang 329 orang.

6). SMA Negeri-1 Kotawaringin Lama.

SMA Negeri-1 Kotawaringin Lama berdiri tahun 2004.

Alamat sekolah di Jl. Pangkalan Muntai, Desa Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama. Jarak dari ibukota kabupaten kurang lebih 50 km. Wilayah kecamatan Kotawaringin Lama berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri-1 Kotawaringin Lama dijabat oleh Drs. Gusti Suriansyah. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 403 orang lulusan. Jumlah siswa sekarang tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 211 orang.

7). SMA Negeri-1 Pangkalan Lada.

SMA Negeri-1 Pangkalan Lada yang semula adalah SMA Swasta PGRI-2 Pangkalan lada yang berdiri tahun 1988. Terletak di Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan lada. Alamat sekolah jalan Ahmad yani Km 40 Pangkalan lada. Jarak dari ibukota kabupaten kurang lebih 40 Km.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri-1 Pangkalan Lada dijabat oleh Suwarno, S.Pd, M.Si. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 1284 orang lulusan. Jumlah siswa sekarang 561 orang.

8). SMA Negeri- 1 Pangkalan Banteng.

SMA Negeri-1 Pangkalan banteng berdiri tahun 2004.

Alamat sekolah di Jl. Pariwisata 1 Bumi Mulya desa Simpang Barambai Kecamatan Pangkalan Banteng . Jarak dari ibukota kabupaten kurang lebih 95 km. Wilayah kecamatan Pangkalan Bateng berbatasan dengan Kabupaten Seruyan.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri-1Pangkalan Banteng dijabat oleh Said Idrus, S.Pd. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 447 orang lulusan. Jumlah siswa sekarang tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 349 orang.

9). SMA Negeri-1 Arut Utara.

SMA Negeri-1 Arut Utara berdiri tahun 2006.

Alamat sekolah di Jl. Manjunghingkat, RT. 5 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara. Jarak dari ibukota kabupaten kurang lebih 150 km.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Negeri-1 Arut Utara dijabat oleh Drs. Matius. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 126 orang lulusan. Jumlah siswa sekatang 121 orang.

10). SMA Abdi Pangkalan Bun

SMA Abdi Pangkalan Bun adalah sekolah swasta dibawah Yayasan Abdi Pangkalan Bun. Berdirinya sekolah tahun 1987. Alamat sekolah di Jl. Kawitan Pangkalan Bun. Terletak di Pusat Kota. Secara administratif masuk wilayah Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA Abdi Pangkalan Bun dijabat oleh Dra. Wajibtati, diangkat dari guru PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 1155 orang. Jumlah siswa sekarang sebanyak 120 orang.

11).SMA PGRI -1 Pangkalan Bun.

SMA PGRI-1 Pangkalan Bun adalah sekolah swasta dibawah Yayasan Pengembangan Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI). Berdirinya sekolah tahun 1984.

Alamat sekolah di Jl. Kawitan I nomor 40Pangkalan Bun. Terletak di Pusat Kota. Secara administratif masuk wilayah Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA PGRI-1 Pangkalan Bun dijabat oleh Eyudia Somu, S.Pd, diangkat dari guru PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak1716 orang lulusan. Jumlah siswa tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 111 orang.

12).SMA PGRI-5 Pirsus Pangkalan Lada.

SMA PGRI-5 Pirsus Pangkalan Lada adalah sekolah swasta dibawah Yayasan Pengembangan Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI). Berdirinya sekolah tahun 1997.

Alamat sekolah di Desa Tiga Pirsus Kecamatan Pangkalan Lada.

Data bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa Kepala SMA PGRI-5 Pirsus dijabat oleh Sutopo, S.Pd, diangkat dari guru

PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Plt. kepala sekolah. Sejak berdiri sampai sekarang telah meluluskan siswa sebanyak 389 orang lulusan. Jumlah siswa tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 95 orang.

2. Temuan Data Hasil Penelitian

Angket yang telah dijawab oleh masing-masing Kepala SMA merupakan data temuan penelitian yang kemudian dihitung jumlah jawaban dari masing-masing SMA terhadap 8 standar nasional pendidikan, kemudian hasil perhitungan tersebut ditabulasikan kedalam tabel sebagaimana dijelaskan pada prosedur pengumpulan data.

Hasil tabulasi jawaban dalam angket yang dituangkan dalam tabel dimaksud adalah seperti pada tabel 4.1.a dan tabel 4.1.b sebagai berikut:

Tabel 4.1.a
 Rekapitulasi Hasil Angket Untuk : Standar Isi,
 Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses,
 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Nama Sekolah	Keterlaksanaan Indikator Standar							
		Standar Isi		Standar SKL		Standar Proses		Standar PTK	
		38 Indikator		8 Indikator		23 Indikator		28 Indikator	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SMAN-1 Pangkalan Bun	34	4	8	0	22	1	21	7
2	SMAN-2 Pangkalan Bun	36	2	4	4	19	4	20	8
3	SMAN-3 Pangkalan Bun	34	4	7	1	19	4	19	9
4	SMAN-1 Kumai	34	4	7	1	19	4	18	10
5	SMAN-2 Kumai	34	4	8	0	21	2	22	6
6	SMAN-1 Kotawaringin Lama	31	7	6	2	15	8	21	7
7	SMAN-1Pangkalan Lada	38	0	8	0	17	6	21	7
8	SMAN-1Pangkalan Banteng	28	10	5	3	10	13	14	14
9	SMAN-1 Arut Utara	35	3	5	3	21	2	18	10
10	SMA ABDI Pangkalan Bun	31	7	6	2	13	10	23	5
11	SMA PGRI- 1 Pangkalan Bun	32	6	8	0	20	3	20	8
12	SMA PGRI – 5 Pirsus Pangkalan Banteng	37	1	7	1	18	5	15	13

Lanjutan
Tabel 4.1.b
Rekapitulasi Hasil Angket Untuk Standar :
Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan
dan Standar Penilaian

No.	Nama Sekolah	Keterlaksanaan Indikator Standar							
		Sarparas		Pengelo laan		Pembiayaan		Penilaian	
		146		88		17		40	
		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
-	-	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	SMAN-1 Pangkalan Bun	132	14	79	9	17	0	39	1
2	SMAN-2 Pangkalan Bun	139	7	73	15	13	4	40	0
3	SMAN-3 Pangkalan Bun	114	32	75	13	13	4	39	1
4	SMAN-1 Kumai	108	38	80	8	16	1	36	4
5	SMAN-2 Kumai	109	37	85	3	14	3	38	2
6	SMAN-1 Kotawaringin Lama	84	62	63	25	16	1	34	6
7	SMAN-1Pangkalan Lada	91	55	82	6	16	1	40	0
8	SMAN-1Pangkalan Banteng	107	39	49	39	5	12	32	8
9	SMAN-1 Arut Utara	60	86	79	9	17	0	38	2
10	SMA AEDI Pangkalan Bun	92	54	80	8	15	2	40	0
11	SMA PGRI- 1 Pangkalan Bun	70	76	71	17	14	3	39	1
12	SMA PGRI – 5 Pirsus Pangkalan Banteng	69	77	81	7	13	4	38	2

B. Pembahasan.

1. Ketercapaian Masing-Masing Standar Nasional Pendidikan.

Dari proses analisis data di atas, maka dapat dipaparkan hasil analisis data yang dituangkan dalam bentuk tabel ketercapaian indikator masing-masing standar oleh masing-masing SMA sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian. Berdasarkan rekapitulasi hasil angket dapat ditemukan angka ketercapaian indikator pada Standar Isi seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2
Tabel Pencapaian 38 Indikator Standar Isi

No	Nama Sekolah	Jumlah Ketercapaian Indikator		(%)	
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	SMAN-1 Pangkalan Bun	34	4	89	11
2.	SMAN-2 Pangkalan Bun	36	2	95	5
3.	SMAN-3 Pangkalan Bun	34	4	89	11
4.	SMAN-1 Kumai	34	4	89	11
5.	SMAN-2 Kumai	34	4	89	11
6.	SMAN-1Kotawaringin Lama	31	7	82	18
7.	SMAN-1Pangkalan Lada	38	0	100	0
8.	SMAN-1 Pangkalan Banteng	28	10	74	26
9.	SMAN-1 Arut Utara	35	3	92	8
10.	SMA Abdi Pangkalan Bun	31	7	82	18
11.	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	32	6	84	16
12.	SMA PGRI-5 Pangkalan Lada	37	1	97	3

b. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator ketercapaian. Berdasarkan rekapitulasi hasil angket dapat ditemukan angka ketercapaian indikator pada Standar Kompetensi Lulusan seperti pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Tabel Pencapaian 8 Indikator Standar Kompetensi Lulusan

No	Nama Sekolah	Jumlah Ketercapaian Indikator		(%)	
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	SMAN-1 Pangkalan Bun	8	0	100	0
2.	SMAN-2 Pangkalan Bun	4	4	50	50
3.	SMAN-3 Pangkalan Bun	7	1	88	13
4.	SMAN-1 Kumai	7	1	88	13
5.	SMAN-2 Kumai	8	0	100	0
6.	SMAN-1 Kota Waringin Lama	6	2	75	25
7.	SMAN-1 Pangkalan Lada	8	0	100	0
8.	SMAN-1 Pangkalan Banteng	5	3	63	38
9.	SMAN-1 Arut Utara	5	3	63	38
10.	SMA Abdi Pangkalan Bun	6	2	75	25
11.	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	8	0	100	0
12.	SMA PGRI-5 Pangkalan lada	7	1	88	13

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian. Berdasarkan rekapitulasi hasil angket dapat ditemukan angka ketercapaian indikator pada Standar Proses seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Tabel Pencapaian 23 Indikator Standar Proses

No	Nama Sekolah	Jumlah Ketercapaian Indikator		(%)	
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	SMAN-1 Pangkalan Bun	22	1	96	4
2.	SMAN-2 Pangkalan Bun	19	4	83	17
3.	SMAN-3 Pangkalan Bun	19	4	83	17
4.	SMAN-1 Kumai	19	4	83	17
5.	SMAN-2 Kumai	21	2	91	9
6.	SMAN-1 Kota Waringin Lama	15	8	65	35
7.	SMAN-1 Pangkalan Lada	17	6	74	26
8.	SMAN-1 Pangkalan Banteng	10	13	43	57
9.	SMAN-1 Arut Utara	21	2	91	9
10.	SMA Abdi Pangkalan Bun	13	10	57	43
11.	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	20	3	87	13
12.	SMA PGRI-5 Pangkalan lada	18	5	78	22

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian. Berdasarkan rekapitulasi hasil angket maka dapat ditemukan angka ketercapaian indikator pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan seperti pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Tabel Pencapaian 28 Indikator Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Nama Sekolah	Jumlah Ketercapaian Indikator		(%)	
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	SMAN-1 Pangkalan Bun	21	7	75	25
2.	SMAN-2 Pangkalan Bun	20	8	71	29
3.	SMAN-3 Pangkalan Bun	19	9	68	32
4.	SMAN-1 Kumai	18	10	64	36
5.	SMAN-2 Kumai	22	6	79	21
6.	SMAN-1 Kotawaringin Lama	21	7	75	25
7.	SMAN-1 Pangkalan Lada	21	7	75	25
8.	SMAN-1 Pangkalan Banteng	14	14	50	50
9.	SMAN-1 Arut Utara	18	10	64	36
10.	SMA Abdi Pangkalan Bun	23	5	82	18
11.	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	20	8	71	29
12.	SMA PGRI-5 Pangkalan Lada	15	13	54	46

e. Standar Sarana Prasarana

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 146 indikator ketercapaian. Berdasarkan rekapitulasi hasil angket maka dapat ditemukan angka ketercapaian indikator pada Standar Sarana dan Prasarana seperti pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Tabel Pencapaian 146 Indikator Standar Sarana dan Prasarana

No	Nama Sekolah	Jumlah Ketercapaian Indikator		(%)	
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	SMAN-1 Pangkalan Bun	132	14	90	10
2.	SMAN-2 Pangkalan Bun	139	7	95	5
3.	SMAN-3 Pangkalan Bun	114	32	78	22
4.	SMAN-1 Kumai	108	38	74	26
5.	SMAN-2 Kumai	109	37	75	25
6.	SMAN-1 Kota waringin Lama	84	62	58	42
7.	SMAN-1 Pangkalan Lada	91	55	62	38
8.	SMAN-1 Pangkalan Banteng	107	39	73	27
9.	SMAN-1 Arut Utara	60	86	41	59
10.	SMA Abdi Pangkalan Bun	92	54	63	37
11.	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	70	76	48	52
12.	SMA PGRI-5 Pangkalan Lada	69	77	47	53

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian. Berdasarkan rekapitulasi hasil angket maka dapat ditemukan angka ketercapaian indikator pada Standar Pengelolaan seperti pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Tabel Pencapaian 88 Indikator Standar Pengelolaan

No	Nama Sekolah	Jumlah Ketercapaian Indikator		(%)	
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	SMAN-1 Pangkalan Bun	79	9	90	10
2.	SMAN-2 Pangkalan Bun	73	15	83	17
3.	SMAN-3 Pangkalan Bun	75	13	85	15
4.	SMAN-1 Kumai	80	8	91	9
5.	SMAN-2 Kumai	85	3	97	3
6.	SMAN-1 Kota Waringin Lama	63	25	72	28
7.	SMAN-1 Pangkalan Lada	82	6	93	7
8.	SMAN-1 Pangkalan Banteng	49	39	56	44
9.	SMAN-1 Arut Utara	79	9	90	10
10.	SMA Abdi Pangkalan Bun	80	8	91	9
11.	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	71	17	81	19
12.	SMA PGRI-5 Pangkalan Lada	81	7	92	8

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian. Berdasarkan rekapitulasi hasil angket maka dapat ditemukan angka ketercapaian indikator pada Standar Pembiayaan seperti pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Tabel Pencapaian 17 Indikator Standar Pembiayaan

No	Nama Sekolah	Jumlah Ketercapaian Indikator		(%)	
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	SMAN-1 Pangkalan Bun	17	0	100	0
2.	SMAN-2 Pangkalan Bun	13	4	76	24
3.	SMAN-3 Pangkalan Bun	13	4	76	24
4.	SMAN-1 Kumai	16	1	94	6
5.	SMAN-2 Kumai	14	3	82	18
6.	SMAN-1 Kota Waringin Lama	16	1	94	6
7.	SMAN-1 Pangkalan Lada	16	1	94	6
8.	SMAN-1 Pangkalan Banteng	5	12	29	71
9.	SMAN-1 Arut Utara	17	0	100	0
10.	SMA Abdi Pangkalan Bun	15	2	88	12
11.	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	14	3	82	18
12.	SMA PGRI-5 Pangkalan lada	13	4	76	24

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian mensyaratkan 40 indikator ketercapaian. Berdasarkan rekapitulasi hasil angket maka dapat ditemukan angka ketercapaian indikator pada Standar Penilaian Pendidikan seperti pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Tabel Pencapaian 40 Indikator Standar Penilaian Pendidikan

No	Nama Sekolah	Jumlah Ketercapaian Indikator		(%)	
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	SMAN-1 Pangkalan Bun	39	1	98	3
2.	SMAN-2 Pangkalan Bun	40	0	100	0
3.	SMAN-3 Pangkalan Bun	39	1	98	3
4.	SMAN-1 Kumai	36	4	90	10
5.	SMAN-2 Kumai	38	2	95	5
6.	SMAN-1 Kota waringin Lama	34	6	85	15
7.	SMAN-1 Pangkalan Lada	40	0	100	0
8.	SMAN-1 Pangkalan Banteng	32	8	80	20
9.	SMAN-1 Arut Utara	38	2	95	5
10.	SMA Abdi Pangkalan Bun	40	0	100	0
11.	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	39	1	98	3
12.	SMA PGRI-5 Pangkalan Lada	38	2	95	5

Berdasarkan analisis data pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan oleh 12 SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan dalam bentuk masing-masing tabel di atas, maka perlu dibuat rekapitulasi data berdasarkan persentase ketercapaian Standar Nasional Pendidikan seperti tabel 4.10 dan rekapitulasi data berdasarkan katagori tingkat pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan seperti tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.10
Persentase Tingkat Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan oleh masing-masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat

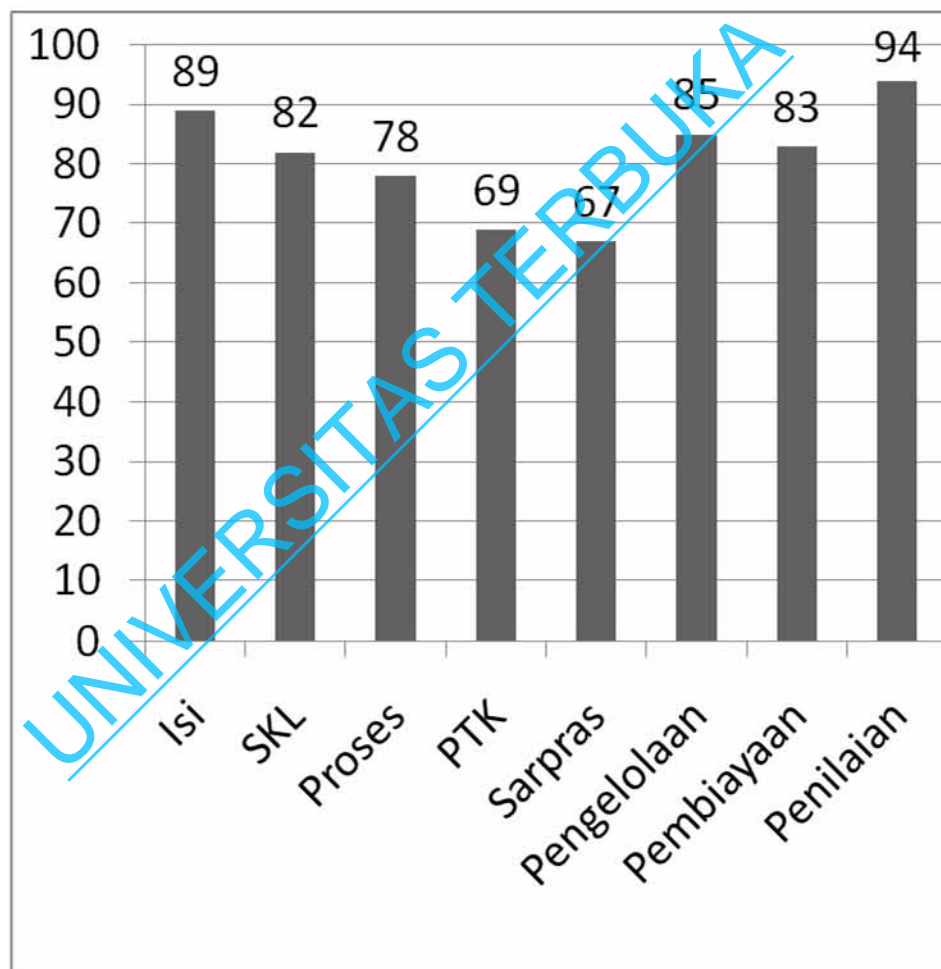
No	Nama Sekolah	Katagori Ketercapaian Standar :								Rata-rata Per SMA
		Isi	SKL	Proses	PTK	Su. Prs	Pengelolaan	Pembiayaan	Penilaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SMAN-1 Pangkalan Bun	89	100	96	75	90	90	100	98	91
2	SMAN-2 Pangkalan Bun	95	50	83	71	95	83	76	100	89
3	SMAN-3 Pangkalan Bun	89	88	83	68	78	85	76	98	82
4	SMAN-1 Kumai	89	88	83	64	74	91	94	90	82
5	SMAN-2 Kumai	89	100	91	79	75	97	82	95	85
6	SMAN-1 Kotawaringin Lama	82	75	65	75	58	72	94	85	70
7	SMAN-1 Pangkalan Lada	100	100	74	75	62	93	94	100	81
8	SMAN-1 Pangkalan Banteng	74	63	43	50	73	56	29	80	64
9	SMAN-1 Arut Utara	92	63	91	64	41	90	100	95	70
10	SMA ABDI Pangkalan Bun	82	75	57	82	63	91	88	100	77
11	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	84	100	87	71	48	81	82	98	71
12	SMA PGRI-5 Pangkalan lada	97	88	78	54	47	92	76	95	72
13	Persentase Rata-Rata	89	82	78	69	67	85	83	94	80,87

Tabel 4.11
 Katagori Tingkat Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan
 oleh SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat

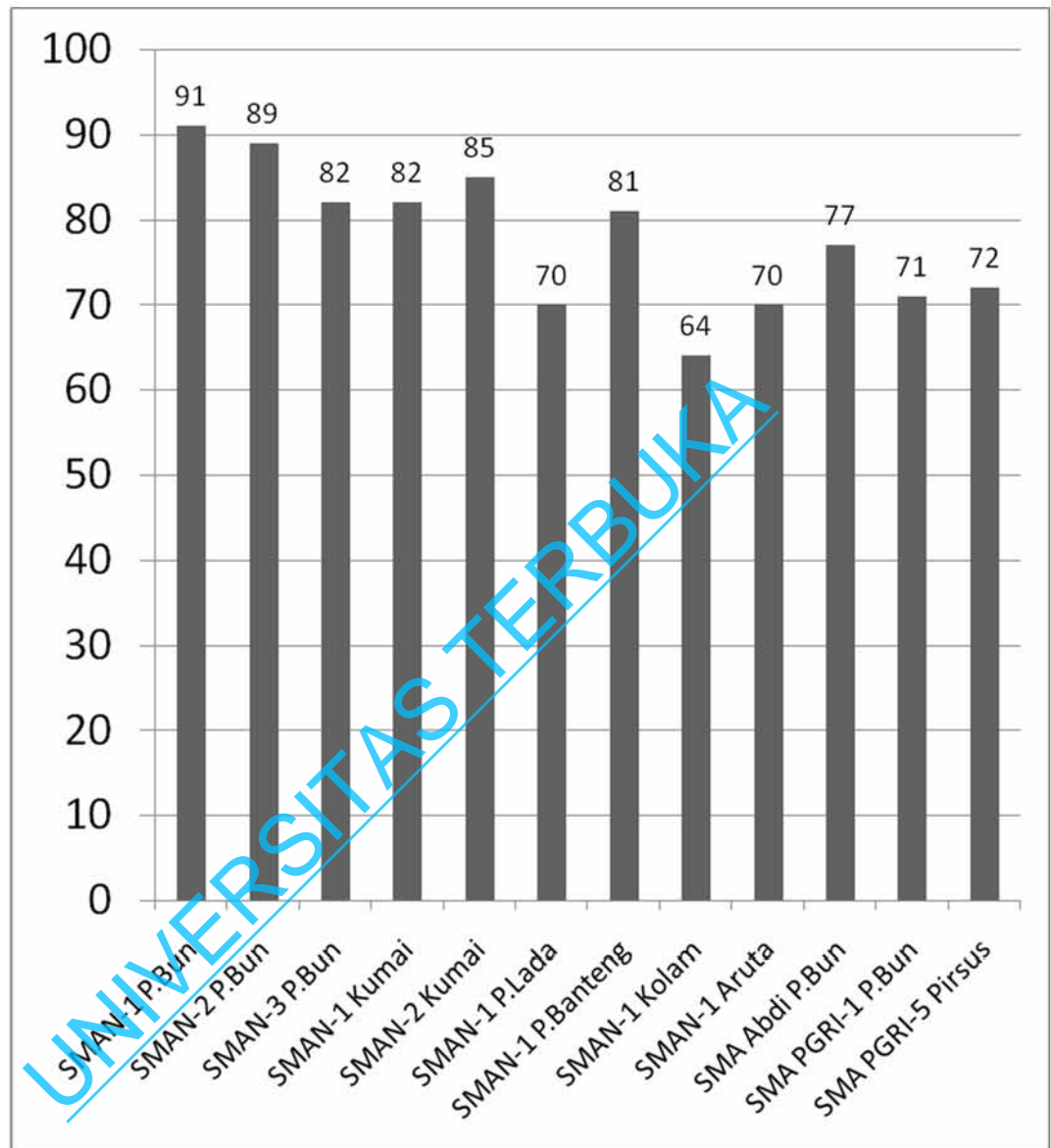
No	Nama Sekolah	Katagori Ketercapaian Standar :								Rata-rata per SMA
		Isi	SKL	Proses	PTK	Sarpras	Pengelolaan	Pembiayaan	Penilaian	
1	SMAN-1 Pangkalan Bun	SB	SB	SB	B	SB	SB	SB	SB	SB
2	SMAN-2 Pangkalan Bun	SB	K	B	C	SB	B	SB	SB	SB
3	SMAN-3 Pangkalan Bun	SB	SB	B	C	B	B	SB	SB	B
4	SMAN-1 Kumai	SB	SB	B	C	C	SB	SB	SB	B
5	SMAN-2 Kumai	SB	SB	SB	B	B	SB	SB	SB	B
6	SMAN-1Ktw. Lama	B	B	C	B	K	C	B	B	C
7	SMAN-1P. Lada	SB	SB	C	B	C	SB	SB	SB	B
8	SMAN-1 P.Banteng	C	C	SK	K	C	K	B	B	C
9	SMAN-1 Aruta	SB	C	SB	C	SK	SB	SB	SB	C
10	SMA Abdi Pangkalan Bun	B	B	K	B	C	SB	SB	SB	B
11	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun	B	SB	SB	C	SK	B	SB	SB	C
12	SMA PGRI-5 Pangkalan lada	SB	SB	B	K	SK	SB	SB	SB	C
	Katagori Rata-Rata	SB	B	B	C	C	B	B	SB	B

Keterangan : SB : Sangat Baik;
 B : Baik;
 C : Cukup;
 K : Kurang;
 SK : Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat diperjelas rata-rata pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti yang disajikan seperti gambar diagram 4.2 dan gambar diagram persentase ketercapaian Standar Nasional Pendidikan oleh masing-masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti gambar diagram 4.3 dibawah ini:



Gambar 4.2
Persentase Rata-Rata Pencapaian Standar Nasional Pendidikan
Pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 4.3
 Persentase Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan
 Oleh Masing-Masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hasil analisis data, bahwa tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada 12 SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai subjek penelitian ini telah memiliki gambaran dengan tingkat

pencapaian relatif berbeda pada masing-masing sekolah sebagaimana yang tertera pada tabel 4.2 sampai dengan tabel 4.9 di atas.

2. Rincian Ketercapaian Indikator Oleh Masing-Masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tingkat pencapaian masing-masing sekolah tersebut perlu dideskripsikan satu persatu, untuk melihat indikator mana saja yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh sekolah dan indikator mana saja yang tidak dicapai.

Untuk menentukan tercapai atau tidaknya masing-masing indikator dari masing-masing standar oleh SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka harus melihat satu persatu indikator-indikator yang terdapat pada angket sebagai instrumen penelitian.

Deskripsi pencapaian standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. SMA Negeri-1 Pangkalan Bun

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-1 Pangkalan Bun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 34 indikator atau 89% berarti katagori **sangat baik**. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator atau 11%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan adalah pertanyaan nomor 15.a, 15.b, 15.c, 15.d pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 8 indikator atau 100% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai tidak ada.

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 22 indikator atau 96% berarti kategori **sangat baik**. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 1 indikator atau 4%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah pertanyaan nomor 31 pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 21 indikator atau 75% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 7 indikator atau 25%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 50.a, 51.a pada aspek tenaga kependidikan; nomor 56.e, 56.e, 57.a, 57.b dan 57.c yaitu pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana Prasarana

Standar Sarana Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 132 indikator atau 90% yang berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum

tercapai sebanyak 14 indikator atau 10%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 66 pada aspek ruang kelas; nomor 78, 79, 80.d pada aspek laboratorium kimia; 90.a, 90.b pada aspek laboratorium bahasa; nomor 113.a pada aspek jamban; nomor 115, 116.a pada aspek gudang; 127.a, 127.b, 127.c, 127.d, 127.d, dan nomor 127.e pada aspek jaringan telekomunikasi dan internet.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 79 indikator atau 90% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 9 indikator atau 10%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 141, 143.c, 143.d pada aspek pelaksanaan rencana kerja; 153 pada aspek evaluasi; nomor 162.d, 162.h, 162.i, 162.k, dan 162.l yaitu pada aspek Sistem Informasi Manajemen (SIM).

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 17 indikator atau 100% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 0 indikator atau 0%.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 39 indikator atau 98% berarti

katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 1 indikator atau 2%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 173 yaitu pada aspek prinsip penilaian.

2. SMA Negeri-2 Pangkalan Bun

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-2 Pangkalan Bun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 36 indikator atau 95% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 2 indikator atau 5%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada nomor 15.d dan nomor 16, yaitu pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 4 indikator atau 50% berarti kategori kurang. Sedangkan yang belum tercapai 4 indikator atau 50%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 18.a, 18.b, 18.c, dan 18.d yaitu pada aspek Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 19 indikator atau 83% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator atau 17%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 25 yaitu aspek perencanaan proses pembelajaran; nomor 31, 37 yaitu aspek pelaksanaan proses pembelajaran; dan nomor 43 yaitu pada aspek pengawasan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 20 indikator atau 71% berarti kategori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 8 indikator atau 29%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 50.b, 51.a, 51.b, 53, 55.a yaitu pada aspek tenaga kependidikan; dan 56.c, 57.a, 57.b yang terdapat pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 139 indikator atau 95% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 7 indikator atau 5%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan

nomor 66 pada aspek ruang kelas; nomor 69.k pada aspek ruang perpustakaan; nomor 80.d pada aspek laboratorium kimia; nomor 94.b pada aspek ruang pimpinan, nomor 119.c pada aspek tempat bermain/ berolah raga; nomor 129, 130 pada aspek website sekolah.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 73 indikator atau 83% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 7 indikator atau 17%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 132.c, 133.c, 135.a, 136 pada aspek perencanaan program; nomor 138, 139, 143.a, 144.b, 146.f, 147 pada aspek pelaksanaan rencana kerja, 149 pada aspek pengawasan; nomor 160 pada aspek kepemimpinan sekolah; nomor 161.b, 162.g dan 162.h yaitu pada aspek Sistem Informasi Manajemen (SIM).

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 13 indikator atau 76% berarti kategori Sebaik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator atau 24%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 167.a, 167.c, 168, 169 yang semuanya pada aspek sumber pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 40 indikator atau 100% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 0 indikator atau 0%.

3. SMA Negeri-3 pangkalan Bun

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-3 Pangkalan Bun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 33 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 34 indikator atau 89% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator atau 11%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada nomor 2.i, 2.j pada aspek dokumen KTSP serta pada nomor 13 dan 15 pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 7 indikator atau 88% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai 1 indikator atau 12%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 22 pada aspek kriteria kelulusan.

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 19 indikator atau 83% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator atau 17%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 25 pada aspek perencanaan proses pembelajaran; nomor 29, 31, 38 pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 19 indikator atau 68% berarti kategori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 9 indikator atau 32%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 47, pada aspek tenaga pendidik; nomor 50.a, 52, 55 pada aspek tenaga kependidikan; serta nomor 56.c, 56.e, 57.a, 57.b, 57.c pada aspek tenaga layanan pendidikan.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 114 indikator atau 78% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 32 indikator atau 22%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat adalah nomor 61 pada aspek bangunan gedung; nomor 63 dan 66 pada aspek ruang

kelas, nomor 69.e, 70 pada aspek ruang perpustakaan; nomor 74.a pada aspek ruang laboratorium biologi; nomor 77.a pada aspek laboratorium fisika, nomor 78 pada aspek laboratorium kimia, nomor 84, 85, 87 pada aspek laboratorium komputer; nomor 90.b, 90.c pada aspek laboratorium bahasa; nomor 97.a, 99.c pada aspek ruang guru; nomor 113.a pada aspek jamban; 115, 116.a, 116.b, 116.c pada aspek gudang; nomor 118 pada aspek tempat bermain/ berolahraga; nomor 122 pada aspek kebersihan dan keindahan, nomor 123, 124, 125, 127.a, 127.b, 127.c, 127.d, 127.e, dan 128 pada aspek jaringan komunikasi internet; nomor 130 pada aspek website sekolah.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 75 indikator atau 85% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 13 indikator atau 15%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 132.a, 132.b, 132.c, 135.a, 135.c, 136 pada aspek perencanaan program; nomor 139, 143.d, 145.b, 145.c, 145.f, 147 pada aspek pelaksanaan rencana kerja; serta nomor 149 pada aspek pengawasan.

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 13 indikator atau 76% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4

indikator atau 24%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 167.a, 167.c, 168, 169 pada aspek sumber pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 39 indikator atau 98% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 1 indikator atau 2%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 173 yaitu pada aspek prinsip penilaian.

4. SMA Negeri – 1 Kumai

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-1 Kumai Bun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 34 indikator atau 89% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator atau 11%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada nomor 1.b, 1.c, 7, 8.c pada aspek dokumen KTSP.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 7 indikator atau 88% berarti kategori sangat baik.

Sedangkan yang belum tercapai indikator atau 12%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada nomor 22 pada aspek kriteria kelulusan.

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 19 indikator atau 83% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator atau 17%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 31, 32, 35 pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran; nomor 41 pada aspek pengawasan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 18 indikator atau 64% berarti kategori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 10 indikator atau 36%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 49.c, 49.d, 50.a, 51.a, 51.b, 55.a pada aspek tenaga kependidikan; nomor 56.c, 57.a, 57.b, 57.c yaitu pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 108 indikator atau

74% berarti katagori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 38 indikator atau 26%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 63, 66 pada aspek ruang kelas; nomor 73 aspek laboratorium biologi, nomor 75, 76 aspek laboratorium fisika; nomor 78, 79, 80.d aspek laboratorium kimia; nomor 83.a, 83.b, 83.c, 83.d aspek laboratorium komputer; nomor 88, 89, 90.a, 90.b, 90.c aspek laboratorium bahasa; nomor 93.a, 93.c, 94.c pada aspek ruang pimpinan; nomor 97.a, 97.c, 97.d, 98.a, 99.a, 99.b, 99.c, 99.d pada aspek ruang guru; nomor 100 pada aspek ruang tata usaha; nomor 106, 108.b pada aspek ruang konseling; nomor 112.a pada aspek ruang organisasi kesiswaan; nomor 114 pada aspek jamban, nomor 115, 116.a, 116.b pada aspek gudang; nomor 128 pada aspek jaringan telekomunikasi internet; serta nomor 130 pada aspek website.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 80 indikator atau 91% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 8 indikator atau 9%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 131.c, 132.a, 132.c, 135.c pada aspek perencanaan program; nomor 141, 145.c, pada aspek pelaksanaan rencana kerja; nomor 160 pada

aspek kepemimpinan sekolah; nomor 161.c pada aspek Sistem Informasi manajemen (SIM).

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 16 indikator atau 94% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 1 indikator atau 6%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 168 pada aspek sumber pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 36 indikator atau 90% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator atau 10%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 172, 173 pada aspek prinsip penilaian; nomor 190.a, 191.a pada aspek penilaian oleh satuan pendidikan.

5. SMA Negeri – 2 Kumai

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-2 Kumai dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 34 indikator atau 89% berarti katagori

sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 4 indikator atau 11%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 15.a, 15.b, 15.c, 15.d yaitu pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 8 indikator atau 100% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai 0 indikator atau 0%.

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 21 indikator atau 91% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 2 indikator atau 9%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 31, 35 yaitu pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 22 indikator atau 79% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 6 indikator atau 21%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 46 aspek tenaga pendidik, nomor 49.c, 49.d dan 50.a

pada aspek tenaga kependidikan; nomor 56.c, 56.e pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 109 indikator atau 75% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 37 indikator atau 25%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 66 aspek ruang kelas; nomor 69.a, 69.b, 69.k, 70 dan 71 pada aspek ruang perpustakaan, nomor 80.d pada aspek laboratorium kimia; nomor 86 pada aspek laboratorium komputer; nomor 91, 94.b pada aspek ruang pimpinan; nomor 104, 105.a, 105.b, 105.c pada aspek tempat ibadah; nomor 109, 110.a, 110.b, 110.c, 110.d pada aspek ruang UKS; nomor 111 pada aspek ruang organisasi kesiswaan, nomor 115, 116.a, 116.b, 116.c pada aspek gudang; nomor 117.a, 117.b pada aspek ruang sirkulasi, nomor 118, 119.a, nomor 119.b, 119.c, 119.d, 120.c pada aspek tempat bermain/ berolahraga; nomor 121.a, 121.b, 121.c, 122 pada aspek kebersihan dan keindahan, nomor 124, 125, 126, 127.a, 127.b, 127.c, 127.d, 127.e dan 128 pada aspek jaringan telekomunikasi dan internet.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 85 indikator atau 97% berarti

katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 3 indikator atau 3 %. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 139, 143.d, pada aspek pelaksanaan rencana kerja nomor 157 pada aspek evaluasi, nomor 160 pada aspek kepemimpinan sekolah.

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 14 indikator atau 82% berarti katagori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 3 indikator atau 18%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 164.c, 164.d yaitu pada aspek jenis pembiayaan; nomor 169 pada aspek sumber pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 38 indikator atau 95% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 2 indikator atau 5%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 172, 173 pada aspek prinsip penilaian.

6. SMA Negeri – 1 Kotawaringin Lama.

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-1 Pangkalan Bun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 31 indikator atau 82% berarti katagori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 7 indikator atau 18%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 1.c, 1.j pada aspek KTSP; nomor 13, 15.a, 15.b, 15.c, 15.d pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 6 indikator atau 75% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai 2 indikator atau 25%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 18.c pada aspek kriteria ketuntasan minimal; serta pertanyaan nomor 22 pada aspek kriteria kelulusan.

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 15 indikator atau 65% berarti katagori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 8 indikator atau 35%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 25 pada aspek perencanaan proses pembelajaran, 29, 30,31,34, 35 pada aspek

pelaksanaan proses pembelajaran; serta nomor 40 dan nomor 41 pada aspek pengawasan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 21 indikator atau 75% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 7 indikator atau 25%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 46, 47 pada aspek tenaga pendidik; 50.a pada aspek tenaga kependidikan, nomor 56.c, 57.a, 57.b, dan 57.c pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 84 indikator atau 58% berarti kategori kurang. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 62 indikator atau 42%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 61 pada aspek bangunan gudang; nomor 66 pada aspek ruang kelas, nomor 69.c, 69.h, 71 pada aspek ruang perpustakaan; nomor 74.a, 74.b, 77.a, 77.b, pada aspek laboratorium fisika; nomor 78, 79, 80.a, 80.b, 80.c, 80.d pada aspek laboratorium kimia; nomor 81, 82, 85, 86, 87 pada aspek laboratorium komputer; nomor 88, 89, 90.a, 90.b, 90.c pada aspek laboratorium bahasa; nomor 94.a, 94.b, 94.c, 94.d pada aspek

ruang pimpinan; nomor 95, 97.a, 98.a, 98.b, 99.a, 99.b, 99.c, 99.d pada aspek ruang guru; nomor 100, 103.c, 103.d pada aspek ruang tata usaha; nomor 104, 105.a, 105.b, 105.c pada aspek tempat ibadah; nomor 106 108.a, 108.b, 108.d pada aspek ruang konseling; nomor 109, 110.a pada aspek ruang UKS; nomor 111, 112.a pada aspek ruang organisasi kesiswaan; nomor 113.a, 114 pada aspek jamban; nomor 125, 126, 127.a, 127.b, 127.c, 127.d, 127.e, 128 pada aspek jaringan telekomunikasi dan internet; nomor 130 pada aspek website sekolah.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 63 indikator atau 72% berarti katagori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 25 indikator atau 28%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 133.a, 133.b, 133.c, 135.a, 135.b, 135.c, 136 pada aspek perencanaan program; nomor 139 pada aspek pelaksanaan rencana kerja; nomor 148, 149, 150 pada aspek pengawasan; nomor 156.a, 156.b, 156.c pada aspek evaluasi; nomor 160 pada aspek kepemimpinan sekolah; nomor 162.a, 162.c, 162.d, 162.f, 162.g, 162.h, 162.i, 162.j, 162.k, 162.l yaitu pada aspem Sistem Informasi Manajemen (SIM).

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 16 indikator atau 94% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 1 indikator atau 6%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 169 yaitu pada aspek sumber pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 34 indikator atau 85% berarti katagori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 6 indikator atau 15%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 172, 173 pada aspek prinsip penilaian; serta pertanyaan nomor 177.a, 177.b, 177.d, 177.e, pada aspek mekanisme dan prosedur penilaian.

7. SMA Negeri -1 Pangkalan Lada

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-1 Pangkalan Lada dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 38 indikator atau 100% berarti tidak

ada indikator yang belum tercapai sehingga katagori sangat baik.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 8 indikator atau 100% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai tidak ada.

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 17 indikator atau 74% berarti katagori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 6 indikator atau 26%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 25, 28 pada aspek perencanaan proses pembelajaran; nomor 31, 32, 35, 37 pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 21 indikator atau 75% berarti katagori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 7 indikator atau 25%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 56.c, 56.d, 56.e, 57.a, 57.b, 57.c, 57.d, pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana Prasarana

Standar Sarana Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 91 indikator atau 62% berarti katagori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 55 indikator atau 38%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 61 pada aspek bangunan gedung, nomor 63, 66 pada aspek ruang kelas, nomor 69.a, 69.b, 69.h, 69.k, 71 pada aspek ruang perpustakaan; nomor 74.c, pada aspek laboratorium biologi, nomor 77.c pada aspek laboratorium fisika; nomor 80.c, 80.d pada aspek laboratorium kimia; nomor 85 pada aspek laboratorium komputer, nomor 88, 90.c pada aspek laboratorium bahasa, nomor 94.e, 94.d pada aspek ruang pimpinan; nomor, 95, 97.d, 98.a, 98.b, 99.a, 99.b, 99.c, 99.d pada aspek ruang guru, nomor 100, 102.c, 103.c pada aspek ruang tata usaha; nomor 110.d pada aspek ruang UKS, nomor 111, 112.a, 112.c pada aspek Ruang organisasi kesiswaan; nomor 115, 116.a, 116.b, 116.c pada aspek gudang; nomor 117.a, 117.b pada aspek Ruang sirkulasi; nomor 122 pada aspek kebersihan dan keindahan, nomor 123, 124, 125, 126, 127.b, 127.c, 127.d, 127.e, 128 pada aspek Jaringan telekomunikasi dan internet.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 82 indikator atau 93% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 6 indikator atau 7%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 135.c, 136 pada aspek Perencanaan program, nomor 139, 141, 146.d pada aspek pelaksanaan rencana kerja, nomor 153 pada aspek evaluasi.

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 16 indikator atau 94% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 1 indikator atau 6%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 167.a yaitu pada aspek sumber pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 40 indikator atau telah mencapai 100% berarti telah mencapai katagori sangat baik.

8. SMA Negeri – 1 Pangkalan Banteng

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-1 Pangkalan Banteng dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 28 indikator atau 74% berarti kategori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 10 indikator atau 26%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 2.i, 8.a, 8.b, 8.c, pada aspek dokumen KTSP, nomor 13, 14, 15.a, 15.b, 15.d, dan nomor 16 pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 5 indikator atau 63% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai 3 indikator atau 38%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada nomor 18.c, 19, pada aspek Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM); dan nomor 22 pada aspek Kriteria Kelulusan.

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 10 indikator atau 43% berarti kategori sangat kurang. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 13 indikator atau 57%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang

belum tercapai adalah terdapat pada nomor 25, 26, 27, 28, pada aspek perencanaan pembelajaran; nomor 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38 pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 14 indikator atau 50% berarti kategori kurang. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 14 indikator atau 50%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 49.e, 49.d, 50.a, 50.b, 51.a, 51.b, 52, pada aspek tenaga kependidikan; nomor 56.c, 56.d, 56.e, 57.a, 57.b, 57.c, 57.d, pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 107 indikator atau 73% yang berarti kategori cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 39 indikator atau 27%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 66 pada aspek ruang kelas; nomor 69.i, 69.k, 70, 71 pada aspek ruang perpustakaan; nomor 81, 82, 83.b, 83.d, 85, 86, 87 yaitu pada aspek laboratorium komputer; nomor 94.c, 94.d pada aspek ruang pimpinan; nomor 95, 97.a, 98.a, 98.b, 99.c, 99.d pada aspek ruang guru; nomor 103.c, 103.d pada aspek ruang tata usaha; nomor 104 pada aspek tempat ibadah; nomor 108.b

pada aspek Ruang Konseling; nomor 113.a pada aspek Jamban; nomor 119.c, 120.b pada aspek Tempat Bermain/ Berolahraga; nomor 123, 124, 125, 126, 127.a, 127.b, 127.c, 127.d, 127.e dan nomor 128 pada aspek Jaringan Telekomunikasi dan Internet; serta nomor 129 dan 130 pada aspek Website Sekolah.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 49 indikator atau 56% berarti kategori Kurang. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 39 indikator atau 44%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada nomor 131.c, 132.a, 135.a, 135.c, 136 pada aspek Perencanaan Program; nomor 139, 141, 142.c, 143.a, 143.b, 143.c, 143.d, 145.a, 145.b, 145.c, 145.d, 145.e, 146.a, 147 pada aspek Pelaksanaan Rencana Kerja; nomor 149 pada aspek Pengawasan; nomor 153, 156.a, 157, 158 pada aspek Evaluasi; nomor 160 pada aspek Kepemimpinan Sekolah; nomor 161.a, 161.b, 162.a, 162.b, 162.c, 162.d, 162.e, 162.f, 162.g, 162.h, 162.i, 162.j, 162.k, 162.l pada aspek Sistem Informasi Manajemen.

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 5 indikator atau 29% berarti kategori Sangat Kurang. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 12 indikator atau 71%. Berdasarkan angket, bahwa

indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 163.a, 163.b, 163.c, 163.d, 164.a, 164.b, 164.c, 164.d dan nomor 166 Jenis Pembiayaan; nomor 167.c, 168, 169 pada aspek Sumber Pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 32 indikator atau 80% berarti katagori Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 8 indikator atau 20%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada nomor 172, 173, pada aspek Prinsip Penilaian; 188.a, 188.b, 188.c, 188.d pada aspek Penilaian Oleh Pendidik; nomor 190.a dan 191.a pada aspek Penilaian oleh Satuan Pendidikan.

9. SMA Negeri – 1 Arut Utara

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-1 Arut Utara dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 35 indikator atau 92% berarti katagori Amat Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 3 indikator atau 8%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada

pertanyaan nomor 1.c pada aspek dokumen KTSP; nomor 12 dan nomor 16 pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 5 indikator atau 63% berarti kategori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai 3 indikator atau 38%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 18.c pada aspek Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM); dan nomor 21, 22 pada aspek Kriteria Kelulusan.

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 21 indikator atau 91% berarti kategori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 2 indikator atau 9%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada pertanyaan nomor 25 pada aspek perencanaan proses pembelajaran; nomor 34 pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 18 indikator atau 64% berarti kategori Cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 10 indikator atau 36%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada

pertanyaan nomor 50.a, 52, 54 pada aspek tenaga kependidikan; nomor 56.a, 56.c, 56.e, 57.a, 57.b, 57.c, 57.d pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 60 indikator atau 41% yang berarti katagori Sangat Kurang. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 86 indikator atau 59%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 66 pada aspek ruang kelas; nomor 68.a, 69.c, 69.d, 69.e, 69.h, 69.i, 69.j, 69.k, 70, 71 pada aspek ruang perpustakaan; nomor 74.a, 74.b, 74.c pada aspek laboratorium biologi; nomor 75, 76, 77.a, 77.b, 77.c yaitu pada aspek laboratorium fisika; nomor 80.a, 80.b, 80.c, 80.d pada aspek laboratorium kimia; nomor 81, 82, 83.a, 83.b, 83.c, 83.d, 84, 85, 86, 87 pada aspek laboratorium komputer; nomor 88, 89, 90.a, 90.b, 90.c pada aspek laboratorium bahasa; nomor 93.c, 94.a, 94.b, 94.c, 94.d pada aspek ruang pimpinan; nomor 95, 97.a, 97.c, 97.d, 98.a, 98.b, 99.a, 99.b, 99.c, 99.d, 99.e pada aspek ruang guru; nomor 100, 103.c, 103.d pada aspek ruang tata usaha; nomor 104, 105.a, 105.b, 105.c pada aspek tempat beribadah; nomor 106, 108.a, 108.b pada aspek Ruang Konseling; nomor 109, 110.a, 110.b, 110.c, 110.d pada aspek ruang UKS; nomor 111, 112.a, 112.b, 112.c pada aspek ruang organisasi kesiswaan; nomor

115, 116.a pada aspek gudang; nomor 117.a, 117.b pada aspek ruang sirkulasi; 123, 124, 125, 126, 127.a, 127.b, 127.c, 127.d, 127.e dan nomor 128 pada aspek Jaringan Telekomunikasi dan Internet; serta nomor 129 dan 130 pada aspek Website Sekolah.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 79 indikator atau 90% berarti katagori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 9 indikator atau 10%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada nomor 132.c, 135.a, 135.c, 136 pada aspek Perencanaan Program; nomor 139 pada aspek Pelaksanaan Rencana Kerja; nomor 149 pada aspek Pengawasan; nomor 157 pada aspek Evaluasi; nomor 161.a dan 162.l pada aspek Sistem Informasi Manajemen (SIM).

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 17 indikator atau 100% berarti katagori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai 0 indikator atau 0%.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 38 indikator atau 95% berarti katagori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 2 indikator atau 5%. Berdasarkan angket, bahwa

indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 173 pada aspek prinsip penilaian; nomor 184 pada aspek penilaian oleh Pendidik.

10. SMA Abdi pangkalan Bun

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA Negeri-1 Abdi Pangkalan Bun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 31 indikator atau 82% berarti kategori Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 7 indikator atau 18%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 13, 14, 15.a, 15.b, 15.c, 15.d, dan nomor 16 pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 6 indikator atau 75% berarti kategori Baik. Sedangkan yang belum tercapai 2 indikator atau 25%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 18.a, dan 18.b pada aspek Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 13 indikator atau 57% berarti katagori Kurang. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 10 indikator atau 43%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada pertanyaan nomor 25, 26 pada aspek perencanaan proses pembelajaran; nomor 31, 35, 38 pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran; nomor 39, 40, 41, 43, 44 pada aspek pengawasan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 23 indikator atau 82% berarti katagori Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 5 indikator atau 18%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 47 pada aspek tenaga pendidik; nomor 50.b pada aspek tenaga kependidikan; nomor 56.c, 56.d, 56.e pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 92 indikator atau 63% yang berarti katagori Cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 54 indikator atau 37%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada, pertanyaan nomor

64.c, 66 pada aspek ruang kelas; nomor 67, 68.a, 68.b, 68.c, 69.b, 69.c, 69.g, 69.j, 69.k, 70, 71 pada aspek ruang perpustakaan; nomor 75, 76, 77.a, 77.b, 77.c yaitu pada aspek laboratorium fisika; nomor 78, 79, 80.a, 80.b, 80.c, 80.d pada aspek laboratorium kimia; nomor 85, 86 pada aspek laboratorium komputer; nomor 88, 89, 90.a, 90.b, 90.c pada aspek laboratorium bahasa; nomor 93.c pada aspek ruang pimpinan; nomor 97.d, 98.a, 99.a, 99.b, 99.c pada aspek ruang guru; nomor 100, pada aspek ruang tata usaha; nomor 104, 105.a, 105.b, 105.c pada aspek tempat beribadah; nomor 106, 108.a, 108.b, 108.c pada aspek Ruang Konseling; nomor 109 pada aspek ruang UKS; nomor 123, 124, 125, 126, 127.d, dan nomor 128 pada aspek Jaringan Telekomunikasi dan Internet; serta nomor 129 dan 130 pada aspek Website Sekolah.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 80 indikator atau 91% berarti kategori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 8 indikator atau 9%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada nomor 136 pada aspek Perencanaan Program; nomor 139, 147 pada aspek Pelaksanaan Rencana Kerja; nomor 153, 155, 156.a, 156.b, 156.c pada aspek Evaluasi.

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 15 indikator atau 88% berarti katagori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai 2 indikator atau 12%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada pertanyaan nomor 167.c, 169 pada aspek sumber pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 40 indikator atau 100% berarti katagori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 0 indikator atau 0%.

11. SMA PGRI -1 Pangkalan Bun

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA PGRI -1 Pangkalan Bun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 32 indikator atau 84% berarti katagori Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 6 indikator atau 16%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 13, 14, 15.a, 15.b, 15.c, 15.d dan nomor 17 pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 8 indikator atau 100% tercapai yang berarti kategori sangat baik.

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 20 indikator atau 87%, berarti kategori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 3 indikator atau 13%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada pertanyaan nomor 28, 32 dan 34 pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 20 indikator atau 71% berarti kategori Cukup. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 8 indikator atau 29%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 46, 49.b, 49.d, 50.a, 51.a, 51.b, pada aspek tenaga kependidikan; nomor 56.c, 56.e pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 70 indikator atau 48% yang berarti kategori Sangat Kurang. Sedangkan yang belum

tercapai sebanyak 76 indikator atau 52%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada, pertanyaan nomor 61, pada aspek bangunan gedung; nomor 71 pada aspek ruang perpustakaan; nomor 72, 73, 74.a, 74.b, 74.c pada aspek laboratorium biologi; nomor 75, 76, 77.a, 77.b, 77.c pada aspek laboratorium fisika; nomor 78, 79, 80.a, 80.b, 80.c, 80.d pada aspek laboratorium kimia; nomor 81, 82, 83.a, 83.b, 83.c, 83.d, 84, 85, 86, 87 pada aspek laboratorium komputer; nomor 88, 89, 90.a, 90.b, 90.c pada aspek laboratorium bahasa; nomor 91, 93.b, pada aspek ruang pimpinan, nomor 95 pada aspek ruang guru; nomor 100 pada aspek ruang tata usaha; nomor 104, 105.a, 105.b, 105.c pada aspek tempat beribadah; nomor 106, 107, 108.a, pada aspek Ruang Konseling; nomor 109, 110.a, 110.b, 110.c, 110.d pada aspek ruang UKS; nomor 111, 112.a, 112.b, 112.c, pada aspek ruang organisasi kesiswaan; nomor 113 pada aspek jamban; nomor 115, 116.a, 116.b pada aspek gudang; nomor 117.a, 117.b pada aspek ruang sirkulasi; nomor 118, 119.a, 119.b, 119.c, 119.d, 120.a, 120.b, 120.c pada aspek tempat berolah raga; nomor 123, 124, 125 pada aspek Jaringan Telekomunikasi dan Internet; serta nomor 129 dan 130 pada aspek Website Sekolah.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 71 indikator atau 81% berarti

katagori Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 17 indikator atau 19%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada nomor 132.a, 132.b, 132.c, 135.a, 135.b, 135.c, dan 136 pada aspek Perencanaan Program; nomor 137.g, 139, 140, 141, 147 pada aspek Pelaksanaan Rencana Kerja; nomor 161.a, 161.b, 161.c, 162.a, 162.b pada aspek sistem informasi manajemen.

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 14 indikator atau 82% berarti katagori Baik. Sedangkan yang belum tercapai 3 indikator atau 18%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada pertanyaan nomor 167.c, 168, 169 pada aspek sumber pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 39 indikator atau 98% berarti katagori Sangat Baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 1 indikator atau 2%. Berdasarkan angket bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 173 pada aspek prinsip penilaian.

12. SMA PGRI – 5 Pirsus Pangkalan Banteng

Pencapaian masing-masing standar oleh SMA PGRI -5 Pirsus Pangkalan Lada dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar Isi mensyaratkan 38 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 37 indikator atau 97% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 1 indikator atau 3%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 14 pada aspek dokumen silabus.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mensyaratkan 8 indikator dan telah tercapai 7 indikator atau 88% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai 1 indikator atau 12%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai atau belum dilaksanakan terdapat pada pertanyaan nomor 19 pada aspek Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

c. Standar Proses

Standar Proses mensyaratkan 23 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 18 indikator atau 78% berarti kategori baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 5 indikator atau 22%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada pertanyaan nomor 27 pada aspek

perencanaan proses pembelajaran; nomor 29, 30, 31, 35 pada aspek pelaksanaan proses pembelajaran..

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mensyaratkan 28 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 15 indikator atau 54% berarti katagori kurang. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 13 indikator atau 46%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 46, 48 pada aspek tenaga pendidik; nomor 49.c, 50.a, 50.b, 51.a, 52 pada aspek tenaga kependidikan; nomor 56.c, 56.d, 56.e, 57.a, 57.b, 57.c pada aspek tenaga layanan khusus.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana mensyaratkan 146 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 69 indikator atau 47% yang berarti katagori sangat kurang. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 77 indikator atau 53%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai terdapat pada pertanyaan nomor 66 pada aspek ruang kelas; nomor 67, 68.a, 68.b, 68.c, 69.a, 69.b, 69.c, 69.d, 69.e, 69.f, 69.g, 69.h, 69.i, 69.j, 69.k, 70, 71 pada aspek ruang perpustakaan; nomor 72, 73, 74.a, 74.b, 74.c, pada aspek laboratorium biologi; nomor 75, 76, 77.a, 77.b, 77.c yaitu pada aspek laboratorium fisika; nomor 78, 79, 80.a, 80.b, 80.c, 80.d pada aspek laboratorium kimia; nomor 81, 82,

83.a, 83.b, 83.c, 83.d, 85, 86, 87 pada aspek laboratorium komputer; nomor 88, 89, 90.a, 90.b, 90.c pada aspek laboratorium bahasa; nomor 94.c, 94.d pada aspek ruang pimpinan; nomor 95, 98.a, 99.c, 99.d pada aspek ruang guru; nomor 100, 103.c, 103.d pada aspek ruang tata usaha; nomor 104, 105.a, 105.b, 105.c pada aspek tempat beribadah; nomor 106, 108.a, pada aspek Ruang Konseling; nomor 109 pada aspek ruang UKS; nomor 113 pada aspek jamban; nomor 115, 116.a, 116.b pada aspek gudang; 123, 124, 126, 127.a, 127.b, 127.c, 127.d, 127.e dan nomor 128 pada aspek Jaringan Telekomunikasi dan Internet; serta nomor 129 dan 130 pada aspek Website Sekolah.

f. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan mensyaratkan 88 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 81 indikator atau 92% berarti kategori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 7 indikator atau 8%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada pertanyaan nomor 141, 143.c, 143.d, 147 pada aspek pada aspek Pelaksanaan Rencana Kerja; nomor 153 pada aspek Evaluasi; nomor 161.a, 161.b pada aspek Sistem Informasi Manajemen (SIM)

g. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mensyaratkan 17 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 13 indikator atau

76% berarti katagori baik. Sedangkan yang belum tercapai 4 indikator atau 24%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada pertanyaan nomor 163.a, 164.a pada aspek jenis pembiayaan; nomor 168, 169 pada aspek sumber pembiayaan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan mensyaratkan 40 indikator ketercapaian dan telah tercapai sebanyak 38 indikator atau 95% berarti katagori sangat baik. Sedangkan yang belum tercapai sebanyak 2 indikator atau 5%. Berdasarkan angket, bahwa indikator yang belum tercapai adalah terdapat pada pertanyaan nomor 172, 173 pada aspek prinsip penilaian.

Uraian pembahasan di atas dapat menggambarkan hasil ketercapaian secara rinci pencapaian masing-masing standar dari 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat.

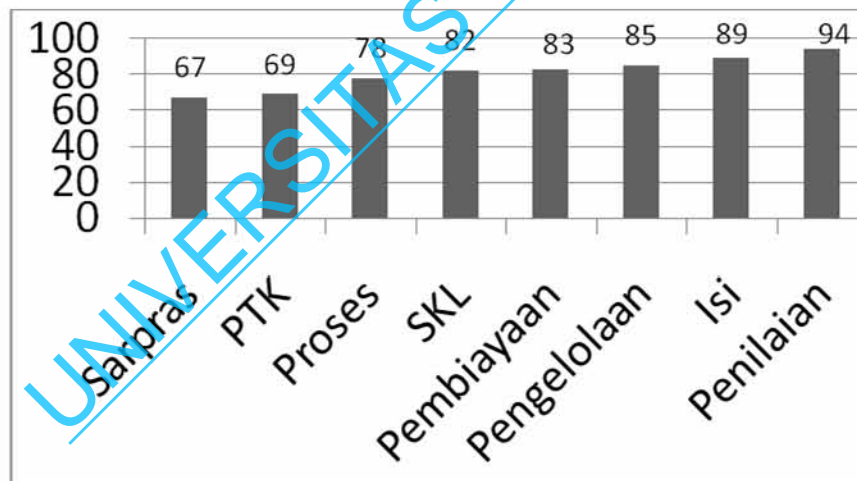
Hasil pencapaian 8 standar itu sendiri memiliki tingkatan dan relatif tidak merata. Ada standar yang tertinggi pencapaiannya, ada yang terendah.

Berikut ini ranking tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12
 Ranking Ketercapaian 8 Standar Nasional Pendidikan
 Oleh SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Urt.	Ranking Ketercapaian	Standar Nasional Pendidikan
1.	I	Standar Penilaian
2.	II	Standar Isi
3.	III	Standar Pengelolaan
4.	IV	Standar Pembiayaan
5.	V	Standar Kompetensi Lulusan
6.	VI	Standar Proses
7.	VII	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8.	VIII	Standar Sarana dan Prasarana

Untuk memperjelas ranking pencapaian 8 standar nasional pendidikan, maka berdasarkan data pada tabel 4.12 di atas dapat dibuat diagram seperti pada gambar diagram 4.4 dibawah ini :



Gambar 4.4
 Ranking Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan
 Oleh SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari tabel 4.12 dan gambar diagram 4.4 di atas secara jelas dapat dikatakan bahwa standar yang paling tinggi ketercapaiannya adalah Standar Penilaian, kemudian disusul Standar Isi, Standar Pengelolaan,

Standar Pembiayaan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta yang paling rendah tingkat ketercapaiannya adalah Standar Sarana dan Prasarana.

Mengapa standar penilaian paling tinggi tingkat pencapaiannya? Secara empiris dapat dijawab, bahwa pendidikan yang berlangsung di sekolah adalah suatu proses dan proses itu perlu dilakukan penilaian untuk mencari umpan balik (*feedback*) yang biasa disebut penilaian formatif, maupun untuk mengetahui sejauhmana pencapaian belajar peserta didik yang biasa disebut penilaian sumatif. Sebagaimana **Norman E. Gronlund** dalam **Purwanto (1984:3)** yang mengatakan :

“Evaluation a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils.(Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa)”.

Dengan demikian maka penilaian atau evaluasi selalu melekat pada proses pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung di sekolah, terlepas dari berbagaimacam kondisi sekolah tersebut.

Begitu pula dengan standar isi dan standar pengelolaan yang menduduki peringkat 2 dan 3 dalam ketercapaiannya. Standar isi merupakan sejumlah kompetensi sebagai dasar pengembangan bahan pelajaran untuk diajarkan. Sedangkan standar pengelolaan adalah cara untuk memenej proses pendidikan dan pengajaran yang berlangsung di sekolah.

Sementara itu standar yang paling rendah ketercapaiannya adalah standar sarana dan prasarana. Standar ini menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana fisik di sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dalam pengadaanya memerlukan dana yang cukup besar.

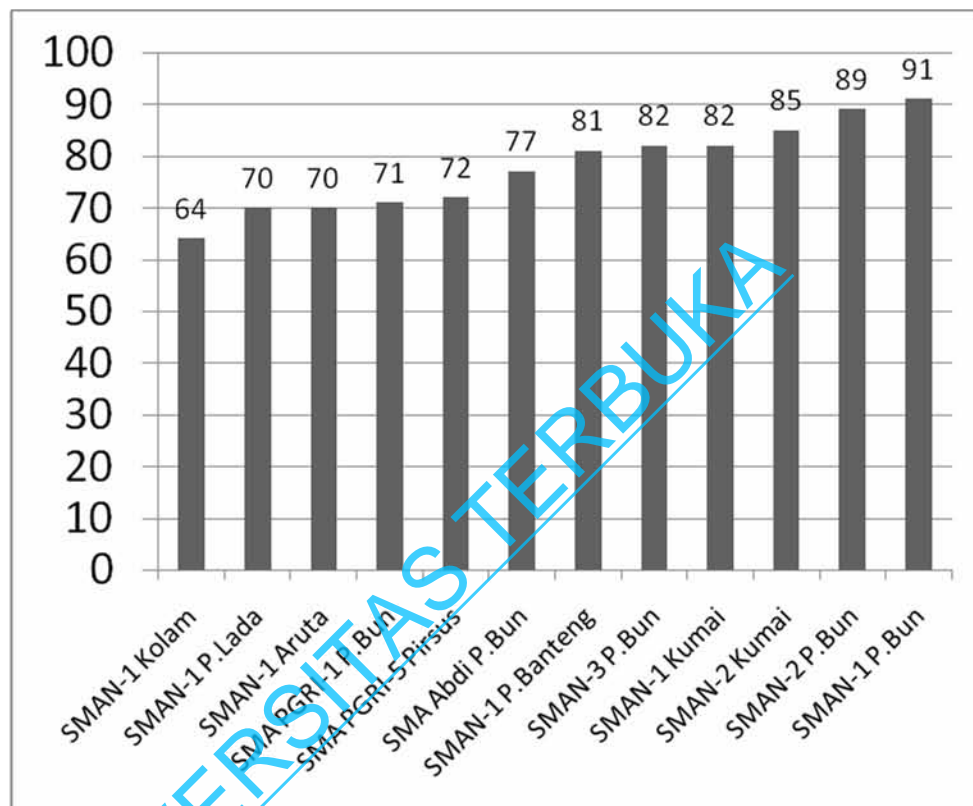
Jika standar sarana dan prasarana pencapaiannya rendah, bisa jadi kebijakan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana tersebut kurang. Jika sekolah swasta, tanggung jawab pembangunannya oleh pihak yayasan selaku pemilik dan pembina sekolah atau kurangnya perhatian pemerintah untuk membantu dalam bentuk hibah (*grant*) untuk pengembangan sekolah swasta.

Selain ranking ketercapaian 8 standar nasional pendidikan seperti diuraikan di atas, pencapaian standar nasional pendidikan oleh masing-masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat juga relatif tidak merata. Berdasarkan data pada tabel 4.10 dan 4.11, maka dapat dibuat ranking pencapaian standar nasional pendidikan oleh masing-masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13
Ranking Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan
Oleh Masing-Masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat

No. Urut	Rangking	Nama Sekolah
1	I	SMAN-1 Pangkalan Bun
2	II	SMAN-2 Pangkalan Bun
3	III	SMAN-2 Kumai
4	IV	SMAN-1 Kumai
5	V	SMAN-3 Pangkalan Bun
6	VI	SMAN-1 Pangkalan Banteng
7	VII	SMA Abdi Pangkalan Bun
8	VIII	SMA PGRI-5 Pirsus
9	IX	SMA PGRI-1 Pangkalan Bun
10	X	SMAN-1 Arut Utara
11	XI	SMAN-1 Pangkalan Lada
12	XII	SMAN-1 Kotawaringin Lama

Untuk memperjelas urutan tingkat pencapaian standar nasional pendidikan oleh masing-masing SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka berdasarkan data pada tabel 4.12 di atas dapat dibuat diagram seperti pada gambar diagram 4.5 dibawah ini :



Gambar 4.5
Ranking Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Oleh SMA
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Hasil pembahasan di atas merupakan hasil evaluasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sehingga data hasil tersebut merupakan data ordinal yaitu data yang menunjukkan urutan sebuah unsur dalam kelompok, dalam hal ini urutan tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh SMA di Kabupaten

Kotawaringin Barat dan urutan SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Hasil penelitian ini merupakan data yang dapat dipakai untuk menilai keterlaksanaan program standarisasi pendidikan nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam mengevaluasi pencapaian standar nasional pendidikan, perlu dipaparkan hasil kajian terdahulu yang relevan agar hasil evaluasi yang dilakukan memiliki perbandingan dan saling dukung.

Suharmi (2009) dalam penelitian Implementasi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Surakarta) menghasilkan temuan diantaranya adalah kegiatan yang dilakukan oleh SMAN-1 Surakarta dalam pelaksanaan KTSP adalah mengadakan komunikasi dengan Dinas terkait, kerjasama dengan komite sekolah. Selanjutnya ditemukan pula bahwa dalam pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, pemerintah kurang memperhatikan pada SMA Swasta, sehingga terjadi kesenjangan antara SMA Negeri dan SMA Swasta.

Hasil penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh **Srianik (2011)** dengan judul penelitian Efektivitas Standar Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini) Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, menggambarkan bahwa Standar Isi, Proses, dan Penilaian,

Standar Sarana Prasarana Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung telah berjalan efektif, dan upaya meningkatkan efektivitas Standar PAUD sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan non formal yang meliputi pembinaan, koordinasi lintas sektoral dan sosialisasi program PAUD di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung berjalan efektif.

Hasil penelitian implementasi oleh Suharmi dan penelitian oleh Sriani di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan standarisasi pendidikan nasional perlu adanya keterlibatan semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung. Standarisasi pendidikan sebagai sebuah kebijakan publik di bidang pendidikan perlu dipelajari formulasinya, perlu diketahui bagaimana implementasinya di lapangan dan perlu adanya evaluasi. Kajian kebijakan publik seperti ini akan menjadikan sebuah kebijakan itu tidak bersifat statis teoritis, tetapi mendorong kearah dinamis dan praktis yang efektif menyangkut hajat hidup orang banyak (publik).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan yang diuraikan dalam data hasil penelitian serta pembahasan, maka simpulannya adalah :

1. Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah termasuk katagori **baik**.
2. Dari 12 SMA yang terdiri 9 SMA Negeri dan 3 SMA Swasta, tidak ada satupun SMA yang mencapai Standar Nasional Pendidikan secara penuh.

Namun demikian berdasarkan katagori pencapaian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, dari 12 SMA yang dievaluasi, terdapat 2 SMA yang tingkat pencapaiannya dengan katagori sangat baik yaitu SMA Negeri-1 Pangkalan Bun dan SMA Negeri-2 Pangkalan Bun

B. Saran

Penelitian evaluasi yang dilakukan ini menghasilkan sebuah deskripsi data tentang tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah dijelaskan pada bagian simpulan. Oleh karena itu saran yang dapat disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan adalah :

a. Pihak Pemerintah Pusat sebagai Pembuat Kebijakan

Pemerintah pusat diharapkan bukan hanya sebagai pembuat kebijakan yang harus dilaksanakan, tetapi pelaksanaan kebijakan itu sendiri perlu adanya dukungan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan itu sendiri perlu dievaluasi.

Dukungan yang dimaksud adalah adanya bantuan (*grant*) yang diberikan kepada daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik serta pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.

Hasil evaluasi ini pula diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya, karena standarisasi pendidikan nasional berhadapan dengan masalah aspek-aspek yang menjadi hambatan dan masalah dalam pembangunan nasional, seperti aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta aspek geografis yaitu perbedaan letak wilayah yang tidak merata keterjangkauannya. Aspek-aspek inilah yang menjadi permasalahan pelaksanaan kebijakan standarisasi pendidikan nasional yang dilaksanakan di daerah.

b. Pemerintah Daerah Sebagai Pelaksana Kebijakan

Hasil penelitian evaluasi ini disamping sebagai bahan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan selanjutnya di bidang pendidikan, juga dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan di bidang pendidikan, karena kebijakan

standarisasi pendidikan nasional adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui Dinas Pendidikan mengupayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pencapaian 8 standar nasional pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan berkelanjutan; Mengupayakan semaksimal mungkin memenuhi Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pembiayaan melalui pembangunan fisik sarana dan prasarana serta pembiayaan operasional sekolah.

c. Sekolah Sebagai Pelaksana Kebijakan di Tingkat Sekolah

Sekolah adalah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Sebagaimana pelaksanaan kebijakan 8 standar nasional pendidikan, ada 5 nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan dan standar penilaian adalah standar pendidikan yang tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya ditentukan oleh tinggi rendahnya kemampuan dan kinerja sekolah. Artinya dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian 5 standar pendidikan ini menjadi tanggung jawab sekolah dalam hal ini guru dan kepala sekolah, karena untuk

mencapai standar tersebut menggunakan pengetahuan, kemauan dan kemampuan guru serta manajemen kepala sekolah, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pencapaian 5 standar dari 8 standar nasional pendidikan, sekolah terutama SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan serta meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas.

d. **Masyarakat dan Orang Tua Peserta Didik**

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan peran masyarakat dan orang tua peserta didik sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku, bahwa tanggung jawab pendidikan diemban oleh tiga komponen yaitu pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Oleh karena itu pelaksanaan standar nasional pendidikan yang ditaksanakan perlu adanya dukungan masyarakat dan orang tua peserta didik berupa partisipasi pembiayaan operasional sekolah, bagi orang tua dan masyarakat yang mampu untuk meningkatkan layanan proses pembelajaran, paling tidak menguipayakan agar tidak ada anak yang tidak melanjutkan kejenjang pendidikan menengah, agar kebijakan standarisasi pendidikan nasional untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dapat berjalan lancar dan mendapatkan layanan dan mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, *Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012*, ISSN :2087-4340, Nomor Publikasi : 6201.0907, Katalog BPS:1101002.6201.
- Branata (1988). Diambil pada tanggal 14 Maret 2013 pukul13.30 WIB dari : <http://nie07independent.wordpress.com/konsep-pendidikan-2/#comment-1319>
- Buku Profil Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011/2012, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, 2011.
- Creswel, John W. (2010). *Research Dsign* (Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif, dan Mixed). Cetakan I. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, Haris.(2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: salemba Humanika.
- Idris (1982:10). Diambil pada tanggal 14 Maret 2013 pukul13.30 WIB dari : <http://nie07independent.wordpress.com/konsep-pendidikan-2/#comment-1319>
- Irawan, Prasetya.(2009) *Metodologi Penelitian Administrasi* (BMP). Ceteakan keempat. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka.
- Kleis (1974). Diambil pada tanggal 14 Maret 2013 pukul13.30 WIB dari : <http://nie07independent.wordpress.com/konsep-pendidikan-2/#comment-1319>
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*-edisi revisi
 Muhammad Munadi dan Barnawi, (2011). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Cetakan I. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Pasalong, Harbani.(2012). *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*. Cetakan kesatu. Bandung : ALFABETA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.(2005). Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Purwanto (1987 :11). Diambil pada tanggal 14 Maret 2013 pukul13.30 WIB dari : <http://nie07independent.wordpress.com/konsep-pendidikan-2/#comment-1319>
- Riduwan.(2010) *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan kedelapan. Bandung: ALFABETA
- Siregar, Sofian (2013), *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Cetakan pertama, Jakarta :PT. Bumi Aksara
- Soeprapto, Riyadi. (2000). *Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Pendekatan)*. Cetakan I. Malang : Universita Negeri Malang (UM PRESS).
- Soeprapto, Riyadi. (2000). *Perencanaan Evaluasi Publik*. Cetakan I. Malang : Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Somantri, Ating dan Muhidin, Sambas Ali (2006) *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian* . Cetakan II-2011. Pustaka Setia

- Srianik, (2012), Efektivitas Standar Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini) Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. *Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan Publik, Universita Merdeka Malang.*
- Suharmi, (2009). Implementasi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan(Studi Kasus di SMA Surakarta), *Tugas Akhir Untuk Mendapatkan Gelar Magister Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Sureakarta.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* (2003) Cetakan I. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 1 :
INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN
2005.

I. Standar Isi :	
A. Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).	
1	Dokumen KTSP yang disusun melalui:
	a Analisis konteks
	b Validasi dan rekomendasi Dinas Pend Kab/Kota
	c Verifikasi dan penandatanganan oleh Dinas Pend. Provinsi
	d Pemberlakuan disahkan oleh Kepala Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah
2	Kelengkapan Struktur dan Muatan KTSP mencakup :
	a Visi, Misi Tujuan Sekolah
	b Struktur Kurikulum
	c Program muatan lokal
	d Kegiatan pengembangan diri (mencakup: jenis program dan strategi pelaksanaan)
	e Pengaturan beban belajar
	f KKM yang ditetapkan oleh sekolah untuk setiap Mapel
	g Pengaturan Kenaikan kelas dan penjurusan, kelulusan
	h Mutasi peserta didik
	i Pendidikan kecakapan hidup
	j Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global
	k Kalender Pendidikan
3	Visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan strategi (mencerminkan upaya untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang berkualitas, dan didukung dengan suasana belajar dan suasana sekolah yang memadai/menyenangkan dan mencirikan adanya program keunggulan lokal.

4	Visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan strategi yang mencerminkan upaya pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas peserta didik sesuai dengan tuntutan standar nasional pendidikan, yang dirumuskan bersama oleh seluruh warga sekolah.
5	Sekolah Memiliki program pengembangan diri.
6	Kalender pendidikan tingkat satuan pendidikan disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik sekolah serta mengacu pada SI mencakup :
	a Perhitungan minggu efektif pembelajaran
	b Waktu libur
	c Ulangan dan ujian
	d Kegiatan khusus yang diprogramkan sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif
7	Sekolah Membentuk Tim Pengembang KTSP dilengkapi dengan SK, uraian tugas, Program Kerja dan Jadwal Kegiatan.
8	Sekolah Memiliki dokumen hasil analisis konteks dan menyusun hasil analisis yang meliputi :
	a Identifikasi Standar Isi, SKL, Standar Pengelolaan, Standar Proses, dan , Standar Penilaian
	b Analisis satuan pendidikan (peserta didik, pendidik & tenaga kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, Program-program sekolah)
	c Analisis peluang dan tantangan masyarakat dan lingkungan (Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Asosiasi Profesi, Dunia Usaha/Dunia Kerja, Sumber Daya Alam, Sosial Budaya)
B.Dokumen Silabus	
1.	Sekolah Mengkaji substansi SK/KD pada Standar Isi dan menjabarkannya ke dalam indikator, mengidentifikasi Materi Pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan jenis penilaian dan alokasi waktu.
2.	Sekolah Memiliki dokumen hasil analisis pemetaan SK/KD.
3.	Sekolah Memiliki dan memanfaatkan berbagai panduan dan contoh silabus yang dikembangkan oleh Pusat sebagai referensi dalam menyusun silabus secara mandiri dengan melibatkan seluruh guru untuk setiap matapelajaran termasuk muatan lokal.

4.	Sekolah Memiliki silabus semua mata pelajaran semua tingkat kelas yang memuat pengalaman belajar yang luas mencakup seluruh matapelajaran, yang dikembangkan melalui proses penjabaran SK/KD menjadi indikator, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran dan jenis penilaian.
5.	Sekolah Melakukan analisis pengintegrasian substansi/bahan kajian keunggulan lokal, pada KD matapelajaran tertentu yang relevan dan mengembangkannya dalam silabus dan RPP.
6.	Sekolah Memiliki SKL, SK, KD dan Silabus muatan lokal semua tingkat kelas.
7	Sekolah dalam penyelenggaraan program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) memiliki :
a	hasil analisis potensi daerah yang mencirikan keunggulan lokal
b	program RPBKL terintegrasi pada matapelajaran
c	program RPBKL melalui program muatan lokal
d	program RPBKL melalui matapelajaran keterampilan
8.	Sekolah Memiliki dokumen silabus dalam bentuk digital.
9.	Silabus yang disusun telah mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis TIK.
II. Standar Kompetensi Lulusan.	
A. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) :	
1.	Kelengkapan dokumen penetapan KKM disusun :
a	berdasarkan hasil analisis kompleksitas kompetensi, intake peserta didik , sumber daya pendukung
b	mulai dari KKM indikator, KKM KD, KKM SK, KKM matapelajaran
c	KKM disetujui dalam rapat Dewan Pendidik
d	Disahkan oleh Kepala Sekolah
2.	KKM sekolah per matapelajaran sudah sesuai.
B. Kreteria Kelulusan	
1.	Sekolah ada Kriteria kelulusan US (KL-US).
2.	Sekolah ada Data Persentase lulusan Ujian Nasional tiga tahun terakhir.

3.	Sekolah Memiliki data Persentase lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi (x).	
III. Standar Proses		
A. Perencanaan Proses Pembelajaran		
1.	Komponen RPP mencakup :	
	a	Identitas matapelajaran, SK, KD, Indikator, Alokasi waktu
	b	Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian Hasil Belajar, dan sumber belajar
2.	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan dari silabus oleh setiap Guru (mencakup satu KD yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih).	
3.	Sekolah Memiliki RPP pendidikan keunggulan lokal terintegrasi sesuai dengan silabus yang dikembangkan.	
4.	Sekolah memiliki bahan ajar dalam bentuk cetakan (Modul, Hand Out, LKS dll), dengan mengintegrasikan bahan kajian keunggulan lokal.	
5.	Guru mengembangkan Bahan ajar dalam bentuk Cetakan (modul, <i>hand out</i> , LKS, dll).	
6.	Guru mengembangkan bahan ajar dalam bentuk Bahan ajar berbasis TIK.	
B. Pelaksanaan proses pembelajaran		
1.	Terpenuhi Jumlah max 32 peserta didik/rombongan belajar.	
2.	Terpenuhi Beban Kerja guru 24 jam per minggu.	
3.	Terpenuhi Ketersediaan buku teks matapelajaran dengan rasio satu buku per peserta didik.	
4.	Terpenuhi Rasio minimal jumlah peserta didik terhadap jumlah guru sebesar 20:1.	
5.	Proses Pembelajaran guru melalui langkah-langkah pembelajaran: pembukaan, inti, penutup.	
6.	Sekolah sudah memanfaatkan laboratorium dalam KBM.	
7.	Sekolah Memiliki penasehat akademik yang dapat mendeteksi potensi peserta didik (bisa dengan tes bakat disertai data prestasi belajar), memberikan bimbingan akademik dan non akademik, membantu memecahkan masalah peserta didik.	

8.	Sekolah memiliki Program Penilaian, remedial dan pengayaan sepanjang semester.
9.	Sekolah Menerapkan pembelajaran berbasis TIK.
10.	Sekolah melakukan penelusuran bakat dan minat peserta didik, dalam rangka pemilihan program keunggulan lokal oleh peserta didik.
C.Pengawasan proses pembelajaran	
1.	Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pemantauan proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.
2.	Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan supervisi proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
3.	Sekolah melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses, dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.
4.	Guru memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran (remedial dan pengayaan).
5.	Sekolah Melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
6.	Sekolah Memberikan penguatan dan penghargaan kepada guru yang telah memenuhi standar dan teguran yang bersifat mendidik kepada guru yang belum memenuhi standar.

IV.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

A.Pendidik

1.	Pendidik berkualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
2.	Pendidik berlatar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan sesuai dengan matapelajaran yang diampu.
3.	Pendidik bersertifikat profesi guru (SP).

4.	Pendidik mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi.	
B.Tenaga kependidikan		
1.	Tenaga kependidikan yang dimiliki oleh sekolah terdiri dari:	
	a	Kepala sekolah
	b	Tenaga administrasi
	c	Tenaga perpustakaan
	d	Tenaga laboratorium
	e	Tenaga kebersihan
2.	Kriteria Tenaga Perpustakaan:	
	a	Memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya atau memiliki sertifikat pustakawan
	b	Mampu mengoperasikan komputer
3.	Kriteria Tenaga Laboran:	
	a	Memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
	b	Mampu menerapkan TIK (Mengoperasikan program office : Word, Excel, Power Point)
4.	Sekolah Memiliki teknisi TIK (boleh guru maupun tenaga khusus).	
5.	Tenaga Administrasi mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi (TA).	
6.	Kepala Sekolah Mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi.	
7.	Tenaga administrasi menerapkan TIK (Kemampuan mengoperasikan MS Office) yang meliputi :	
	a	MS Acces
	b	MS Excel
	c	MS Word
C.Tenaga Layanan Khusus		
1.	Sekolah Satuan pendidikan memiliki tenaga layanan khusus diantaranya:	
	a	penjaga sekolah
	b	tenaga kebersihan
	c	Pengemudi
	d	tukang kebun
	e	Pesuruh

2.	Satuan pendidikan memiliki tenaga layanan khusus dalam bidang Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang meliputi :	
	a	Pelaksana Operasional Pusat Sumber Belajar (PJP Pelaksana RPSB)
	b	Pengembang Konten Pusat Sumber Belajar
	c	Pengelola Teknis Jaringan Pusat Sumber Belajar (Admin/teknisi RPSB)
	d	Pengelola Paket Administrasi Sekolah (PAS)
V. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		
A. Satuan pendidikan		
1.	Sekolah Memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.	
B. Lahan		
1.	Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.	
C. Bangunan gedung		
1.	Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt.	
2.	Sekolah Memiliki Sumber Daya Listrik yang mencukupi (untuk PSB).	
3.	Bangunan secara berkala dilakukan pemeliharaan baik ringan maupun berat (<i>Kebersihan, Kenyamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keamanan</i>).	
D. Ruang kelas		
1.	Jumlah minimum ruang kelas sama dengan jumlah rombongan belajar.	
2.	Ruang kelas dilengkapi sarana meliputi:	
	a	perabot (kursi dan meja peserta didik, kursi dan meja guru, lemari dan papan pajang)
	b	media pendidikan (papan tulis)
	c	perlengkapan lain (tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, soket listrik)
3.	Ruang kelas memiliki pencahayaan yang memadai.	
4.	Ruang kelas terpasang perangkat TIK (minimal LCD Proyektor).	
E. Ruang perpustakaan		

1.	Luas ruang perpustakaan minimum 30 m ² dengan lebar minimum 5 m.
2.	Ruang perpustakaan dilengkapi buku:
	a buku teks pelajaran dan buku panduan pendidik,
	b buku pengayaan,
	c buku referensi dan sumber belajar lain
3.	Ruang perpustakaan dilengkapi dengan perabot :
	A rak buku
	B rak majalah
	C rak surat kabar
	D meja baca
	E kursi baca
	F kursi kerja
	G meja kerja/sirkulasi
	H lemari katalog
	I Lemari
	J papan pengumuman
	K meja multi media
4.	Ruang perpustakaan dilengkapi dengan komputer administrasi perpustakaan.
5.	Ruang perpustakaan dilengkapi dengan bahan ajar berbasis TIK berbentuk CD/Multimedia.
F.Laboratorium biologi	
1.	Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar.
2.	Luas laboratorium biologi minimum 48 m ² untuk jumlah siswa kurang dari 20 luas per anak min 2,4 m ² dan ruang penyimpanan 18 m ² .
3.	Ruang laboratorium sudah dilengkapi :
	a perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan)
	b media pendidikan
	c bahan habis pakai
G.Laboratorium fisika	
1.	Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar.

2.	Luas laboratorium Fisika minimum 48 m ² atau untuk jumlah siswa kurang dari 20 luas per anak min 2,4 m ² dan ruang penyimpanan 18 m ² .
3.	Ruang laboratorium sudah dilengkapi :
a	perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan)
b	media pendidikan
c	bahan habis pakai
H.Laboratorium kimia	
1.	Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar.
2.	Luas laboratorium Kimia minimum 48 m ² luas per anak min 2 m ² .
3.	Ruang laboratorium dilengkapi sarana :
a	perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan)
b	media pendidikan
c	bahan habis pakai
d	Ruang asam
I.Laboratorium komputer	
1.	Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang.
2.	Rasio minimum luas ruang laboratorium komputer 2 m ² /peserta didik. Lebar minimum ruang laboratorium komputer 5 m.
3.	Ruang laboratorium dilengkapi sarana :
a	Komputer, printer
b	UPS
c	modul pembelajaran (hard copy maupun softcopy),
d	Jaringan LAN atau akses internet
4.	Ruang kelas memiliki pencahayaan dan pendinginan ruangan yang memadai.
5.	Sekolah Memiliki Laboratorium Komputer dengan jumlah komputer minimal 20 unit yang terhubung dengan internet.
6.	Komputer pada laboratorium Komputer telah terkoneksi dengan jaringan LAN.

7.	Laboratorium Komputer sudah memiliki dan mengadopsi jaringan dengan menggunakan server.
J.Laboratorium bahasa	
1.	Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar.
2.	Rasio minimum luas ruang laboratorium bahasa 2 m ² /peserta didik. Lebar minimum ruang laboratorium komputer 5 m.
3.	Ruang laboratorium dilengkapi sarana :
a	perabot(meja, kursi), dan Perangkat Audio
b	Prangkat Visual
c	Modul Pembelajaran hardcopy/softcopy
K.Ruang Pimpinan	
1.	Luas ruang pimpinan minimum 12 m ² dengan lebar minimum 3 m.
2.	Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah.
3.	Ruang pimpinan memenuhi kriteria :
a	untuk melayani tamu
b	Dilengkapi perabot yang memadai
c	Papan informasi kegiatan/statistik
d	Nyaman dan bersih
4.	Ruang Pimpinan sudah dilengkapi :
a	Komputer
b	Printer
c	Koneksi intranet
d	Koneksi Internet
L.Ruang Guru	
1.	Luas ruang Guru minimum 72 m ² dengan Rasio minimum luas ruang 4 m ² /pendidik.
2.	Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah atau dari luar lingkungan sekolah dan dekat dengan ruang pimpinan.
3.	Ruang guru sudah :

	a	Mampu menampung semua Guru
	b	Dilengkapi perabot (meja, kursi, almari)
	c	Papan informasi kegiatan/statistik
	d	Komputer dan printer
	e	Nyaman dan bersih
4.		Pengaturan ruang guru memungkinkan untuk :
	a	mobilitas MGMP rumpun mata pelajaran
	b	memberikan layanan konsultasi akademik siswa
5.		Ruang Pendidik sudah dilengkapi:
	a	Komputer
	b	Printer
	c	Koneksi intranet
	d	Koneksi Internet
M.Ruang tata usaha		
1.		Luas ruang tata usaha minimum 16 m ² dengan Rasio minimum luas ruang 4 m ² /pendidik.
2.		Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah atau dari luar lingkungan sekolah dan dekat dengan ruang pimpinan.
3.		Ruang tata usaha sudah :
	a	Sebagai tempat mengerjakan administrasi sekolah
	b	Dilengkapi perabot (meja, kursi, almari), papan informasi kegiatan/statistik.
	c	Tertata rapi, nyaman dan bersih.
	d	Tersedia mesin ketik/ komputer/peralatan lainnya yang dibutuhkan.
4.		Ruang Tata Usaha sudah dilengkapi :
	a	Komputer
	b	Printer
	c	Koneksi intranet
	d	Koneksi Internet
N.Tempat beribadah		

1.	Tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan dengan luas minimum 12 m ² .
2.	Tempat ibadah apakah sudah memenuhi kriteria :
a	Luas memadai sesuai kebutuhan atau minimal 12 m ²
b	Tersedia perabot dan perlengkapan ibadah
c	Tertata rapih, nyaman dan bersih
O.Ruang Konseling	
1.	Luas ruang konseling minimum 12 m ² .
2.	Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik.
3.	Ruang konseling memenuhi kriteria:
a	Luas memadai sebagai tempat layanan konseling
b	Perabot (meja+kursi kerja, kursi tamu, almari) sesuai kebutuhan
c	Peralatan konseling (instrumen konseling, buku sumber, media pengemb. kepribadian)
d	Nyaman, bersih dan menjamin privasi peserta didik
P.Ruang UKS	
1.	Luas ruang UKS minimum 12 m ²
2.	Ruang UKS memenuhi kriteria :
a	Luas memadai untuk penanganan dini yang mengalami gangguan kesehatan
b	Perabot (tempat tidur, almari, meja+kursi)
c	Perlengkapan kesehatan (P3K, tandu, selimut, tensimeter, termometer badan, timbang badan, dll)
d	Tertata rapi, nyaman dan bersih
Q.Ruang organisasi kesiswaan	
1.	Luas ruang organisasi kesiswaan minimum 9 m ² .
2.	Ruang organisasi kesiswaan memenuhi kriteria :
a	Luas memadai untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan
b	Perabot (meja+kursi, almari, papan tulis)
c	Tertata rapi, nyaman dan bersih

R.Jamban	
1.	Untuk jamban memenuhi kriteria :
a	Minimal rasio 1:30 untuk peserta putri dan 1:40 untuk peserta putra
b	Tersedia minimal 1 unit untuk tendik
c	Bersih dan terawat.
2.	Luas minimum 2 m ² /jamban.
S.Gudang	
1.	Luas Gudang minimum 21 m ² .
2.	Gudang Sekolah memenuhi kriteria :
a	Luas memadai sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran, peralatan sekolah, arsip sekolah
b	Perabot (almari dan rak)
c	Bersih, rapih dan aman
T.Ruang sirkulasi	
1.	Ruang sirkulasi berfungsi sebagai:
a	tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah
b	tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran
U.Tempat bermain/berolahraga	
1.	Luas tempat bermain/berolahraga minimum 3 m ² /peserta didik.
2.	Tempat bermain/berolahraga berupa :
a	ruang terbuka
b	sebagian ditanami pohon
c	tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas
d	tidak digunakan parkir
3.	Tempat bermain/berolahraga memenuhi kriteria:
a	Luas memadai sebagai tempat bermain/berolahraga, upacara, dan ekstrakurikuler

	b	Peralatan pendidikan (peralatan upacara, peralatan olahraga, peralatan seni budaya, peralatan keterampilan, dll)
	c	Rapih, bersih, nyaman
V.Kebersihan dan keindahan		
1.	Semua lahan, bangunan/gedung, sarana dan prasarana lainnya memenuhi kriteria:	
	a	tertata rapih, terpelihara
	b	keadaan bersih
	c	aman dan nyaman
2.	Sekolah berupaya untuk meoptimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan PBKL.	
W.Jaringan Telekomunikasi dan internet		
1.	Terdapat koneksi Internet di sekolah untuk menunjang operasional kegiatan PSB.	
2.	Kapasitas bandwidth rata-rata yang tersedia di sekolah.	
3.	Terdapat hot spot di lingkungan sekolah.	
4.	Sekolah menyediakan komputer yang terhubung internet selain di Lab komputer untuk mencari sumber belajar bagi Peserta Didik maupun guru.	
5.	Sekolah memiliki jaringan LAN antar ruangan di:	
	a	Laboratorium Komputer
	b	Ruang Tata Usaha
	c	Ruang Guru
	d	Perpustakaan
	e	Ruang Kepala Sekolah
6.	Keseluruhan jaringan komputer di sekolah telah terhubung dengan internet.	
X.Website sekolah		
1.	Sekolah memiliki website sekolah.	

2.	Website sekolah berbasis portal.	
VI. Standar Pengelolaan		
A. Perencanaan program		
1.	Sekolah memiliki visi, misi dan tujuan sekolah mencakup :	
	a	Visi, misi dan tujuan mudah dipahami dan saling terkait satu dengan lainnya
	b	Dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan
	c	Ditetapkan oleh rapat dewan pendidikan
	d	disosialisasikan kepada warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan
2.	Dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan :	
	a	disetujui rapat dewan pendidik
	b	memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan
	c	disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota bagi sekolah negeri dan oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta
3.	Sekolah memiliki rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S) dengan kriteria :	
	a	disetujui rapat dewan pendidik
	b	memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah
	c	disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota bagi sekolah negeri dan oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta
4.	Rencana kerja tahunan memuat :	
	a	Kesiswaan
	b	kurikulum dan kegiatan pembelajaran
	c	pendidik dan tenaga kependidikan
	d	sarana dan prasarana

	e	keuangan dan pembiayaan
	f	budaya dan lingkungan sekolah
	g	peran serta masyarakat dalam pendidikan
	h	rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan mutu
5.	Sekolah memiliki rencana pengembangan Pusat Sumber Belajar yang mencakup:	
	a	Rencana kerja jangka menengah (empat tahunan)
	b	Rencana kerja tahunan
	c	Rencana kerja jangka menengah dan tahunan disetujui rapat dewan pendidik
6.	Sekolah memiliki panduan pelaksanaan PBKL.	
B.Pelaksanaan rencana kerja		
1.	Sekolah Memiliki pedoman pengelolaan sekolah berupa :	
	a	KTSP
	b	kalender pendidikan
	c	struktur organisasi sekolah
	d	pembagian tugas diantara guru dan tenaga kependidikan
	e	tata tertib sekolah
	f	peraturan akademik
	g	kode etik sekolah
	h	biaya operasional sekolah
2.	Sekolah memiliki Struktur organisasi sekolah yang berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.	
3.	Sekolah memiliki program kerja sekolah dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan implementasi PBKL.	
4.	Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional proses penerimaan peserta didik.	
5.	Sekolah menjalin kemitraan dengan sekolah sekitar (minimal 2 sekolah mitra).	
6.	Sekolah menyusun dan menetapkan peraturan akademik yang berisi :	
	a	Persyaratan minimal kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru

	b	Ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan
	c	Ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru matapelajaran, wali kelas, dan konselor
7.	Sekolah melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan mencakup :	
	a	promosi berdasarkan azas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme
	b	pengembangan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah
	c	penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas
	d	mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana mencakup :	
	a	Upaya merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan, sarana dan prasarana pendidikan
	b	Evaluasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
	c	Upaya melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap kelas
9.	Pengelolaan pembiayaan sesuai dengan pedoman pengelolaan pembiayaan meliputi:	
	a	sumber pemasukkan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola
	b	penyusunan dan pencairan anggaran
	c	penggalangan dana diluar dana investasi dan operasional
	d	penggunaan anggaran keuangan sesuai dengan RKA-S
	e	pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran
	f	dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya
10.	Sekolah tercipta suasana, iklim dan lingkungan sekolah yang kondusif dengan minimal kondisi :	

	a	Tersedia akses informasi-informasi penting yang mudah diakses oleh warga dan tamu sekolah
	b	Tersedia petunjuk, peringatan, larangan dan sanksi dalam berperilaku di
	c	Dilaksanakannya sistem penghargaan dan sanksi
	d	Teramati kedisiplinan warga sekolah (taat asas dan taat waktu)
	e	Teramati tata pergaulan didalam sekolah dengan saling menghormati
	f	Sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah terjaga
11.	Apakah Sekolah menjalin kemitraan minimal dengan PT, SMP/MTs, dunia usaha dan industri berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan berdasarkan perjanjian tertulis.	
C.Pengawasan		
1.	Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.	
2.	Pelaksanaan pemantauan secara teratur dan berkelanjutan oleh komite sekolah untuk menilai efisiensi, elektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.	
3.	Pelaksanaan supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.	
D.Evaluasi		
1.	Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah yang meliputi :	
	a	Evaluasi proses pembelajaran, sekurang-kurangnya 2 kali per tahun, pada akhir semester akademik
	b	Evaluasi program kerja tahunan sekurang-kurangnya satu kali setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah
2.	Sekolah melakukan evaluasi dan pengembangan KTSP.	
3.	Sekolah selakukan pelacakan terhadap alumni.	
4.	Sekolah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.	
5.	Sekolah melakukan pembinaan prestasi unggulan.	
6.	Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan secara komperhensif pada setiap akhir semester yang meliputi :	

	a	kesesuaian penugasan dengan keahlian
	b	keseimbangan beban kerja
	c	kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas
7.	Sekolah ada hasil Pencapaian Akreditasi	
8.	Sekolah melakukan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan PSB.	
E.Kepemimpinan sekolah		
1.	Kepala sekolah dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana dan kesiswaan.	
2.	Wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik dan proses pengangkatan serta keputusannya dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi di atasnya (untuk sekolah swasta institusi yang dimaksud adalah penyelenggara sekolah)	
F.Sistem informasi manajemen (SIM)		
1.	Sekolah mengelola SIM yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel yang mencakup :	
	a	Menyediakan fasilitas informasi (website/jejaring sosial/leaflet/booklet/majalah/papan informasi, papan informasi, LAN dan sejenisnya) yang mudah diakses
	b	Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan
	c	Melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2.	Sekolah menggunakan sebagian atau seluruh modul-modul di bawah ini :	
	a	Memiliki aplikasi penerimaan Peserta Didik baru
	b	Memiliki aplikasi pengelolaan data personal Peserta Didik
	c	Memiliki aplikasi pengelolaan hasil proses pembelajaran Peserta Didik
	d	Memiliki aplikasi pengelolaan proses keuangan
	e	Memiliki aplikasi pengelolaan data guru dan karyawan
	f	Memiliki aplikasi pengelolaan aset dan perlengkapan

	g	Memiliki aplikasi publikasi informasi
	h	Memiliki aplikasi konsolidasi laporan periodik pendidikan
	i	Memiliki aplikasi pengelolaan ruangan belajar
	j	Memiliki aplikasi pengelolaan jadwal pengajaran
	k	Memiliki aplikasi pengelolaan jadwal guru mengajar
	l	Memiliki aplikasi pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler
VII. Standar Pembiayaan		
A. Jenis pembiayaan		
1.	Sekolah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya investasi termasuk biaya pengembangan keunggulan lokal yang berupa:	
	a	Sarana prasarana
	b	Peserta Didik
	c	Pendidik
	d	Tenaga Kependidikan
2.	Sekolah mengalokasikan biaya pengembangan sarana TIK pada :	
	a	Pengadaan sarana prasarana
	b	Perawatan
	c	Pendidik
	d	Tenaga Kependidikan
3.	Sekolah mengalokasikan biaya operasi meliputi :	
	a	Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
	b	Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya
4.	Sekolah bersama komite sekolah merancang dan menetapkan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.	
B. Sumber pembiayaan		

1.	Sekolah menggali sumber-sumber pembiayaan pendidikan dari orang tua peserta didik/masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan secara mandiri yang terdiri dari:	
	a	Sumber dana dari Orang Tua /Masyarakat
	b	Sumber dana dari Pemerintah
	c	Sumber dana dari Donatur Lain
2.	Sekolah memiliki program kerja operasional tahunan dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber.	
3.	Sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber dalam Implementasi PBKL.	
C.Pelaporan		
1.	Sekolah membuat laporan pertanggung-jawaban secara akuntabel dan transparan.	
VIII.Standar Penilaian		
A. Prinsip Penilaian		
1.	Seluruh pendidik (x) telah melakukan penilaian hasil belajar untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.	
2.	Sekolah memiliki petunjuk operasional penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar.	
3.	Sekolah memiliki petunjuk operasional penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar melalui media elektronik.	
B.Teknik dan instrumen penilaian		
1.	Teknik penilaian dilakukan sesuai KD dengan kriteria:	
	a	Terprogram menggunakan Tes dan Non Tes
	b	Menggunakan soal yang memenuhi kaidah substansi konstruksi dan bahasa
C.Mekanisme dan prosedur penilaian		
1.	Sekolah mengembangkan program penilaian menggunakan lima langkah yaitu :	

	a	Menyusun kisi-kisi tes
	b	Mengembangkan instrumen
	c	mengolah dan menentukan kelulusan siswa dari sekolah
	d	Melaksanakan tes
	e	Melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian
2.	Seluruh pendidik (x) melakukan penilaian hasil belajar untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.	
3.	Sekolah melakukan penilaian internal untuk semua matapelajaran yang tidak dites dalam UN yang mencakup:	
	a	Menyusun kisi-kisi prediksi soal US
	b	Menyusun soal prediksi US
	c	Menyelenggarakan Pendalaman materi (PM)
	d	Melaksanakan tes Pra US
	e	Melakukan Pengolahan hasil Pra US
4.	Guru Agama melakukan:	
	a	penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia
	b	memanfaatkan informasi dari pendidik matapelajaran lain dan sumber lain yang relevan
5.	Guru Pendidikan Kewarganegaraan melakukan:	
	a	penilaian kepribadian
	b	memanfaatkan informasi dari pendidik matapelajaran lain dan sumber lain yang relevan
6.	Sekolah menerbitkan surat keterangan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pengembangan diri yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah.	
7.	Guru matapelajaran menginformasikan hasil ulangan harian kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya	
8.	Guru matapelajaran memberi remedi kepada peserta didik yang belum mencapai KKM.	

9.	Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi matapelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.	
D.Penilaian oleh pendidik		
1.	Guru menginformasikan silabus matapelajaran kepada peserta didik pada awal semester.	
2.	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.	
3.	Guru melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan sesuai dengan RPP.	
4.	Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.	
5.	Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.	
6.	Analisis dan pemanfaatan hasil penilaian dibuat dengan:	
	a	Hasil Penilaian dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan yang mendidik
	b	analisis daya serap hasil penilaian
	c	Hasil Analisis ditindak lanjuti dengan Remedi / Pengayaan
	d	Hasil Penilaian digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran
E.Penilaian oleh satuan Pendidikan		
1.	Sekolah menetapkan dan mendokumentasikan:	
	a	KKM setiap matapelajaran
	b	kriteria kenaikan kelas
	c	kreteria kelulusan peserta didik
2.	Sekolah menentukan nilai akhir kelompok matapelajaran estetika dan kelompok matapelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui:	
	a	rapat dewan pendidik
	b	mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik
3.	Sekolah menentukan nilai akhir kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:	
	a	rapat dewan pendidik
	b	mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah

Lampiran 2.

**ANGKET
KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PADA SMA DI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2013**

A. PENGANTAR

Dalam rangka pengumpulan data penelitian yang berjudul Standarisasi Pendidikan Nasional (Studi Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pada SMA di Kabupaten Kotawaringin Barat), mohon kesediaan Bapak/Ibu Kepala SMA se Kotawaringin Barat untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada angket ini sesuai dengan petunjuk pengisian serta jawaban sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak berpengaruh pada penilaian kinerja Bapak/Ibu sebagai Kepala Sekolah. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

B. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Isilah identitas sekolah dan nama Kepala Sekolah sebagai Responden
2. Bacalah secara teliti setiap pertanyaan sebelum Bapak/Ibu menjawab
3. Pilihlah salah satu jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan situasi dan kondisi sebenarnya dengan pilihan jawaban YA atau TIDAK dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom yang sesuai/ disediakan.
4. Pada halaman akhir bubuhkan tempat (Ibu kota/Kabupaten/ Ibu kota kecamatan dimana sekolah berada, tanggal pengisian angket serta dan Nama Kepala Sekolah, NIP, tanda tangan Kepala Sekolah serta dibubuhkan cap stempel sekolah.

C. IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah :

Alamat :

Nama Kepala Sekolah / Responden :

D. ANGKET :

NO	PERTANYAAN		JAWABAN	
			YA	TIDAK
Dokumen KTSP				
1	Apakah Sekolah memiliki dokumen KTSP yang disusun melalui:			
	A	Analisis konteks		
	B	Validasi dan rekomendasi Dinas Pend Kab/Kota		
	C	Verifikasi dan penandatanganan oleh Dinas Pend. Provinsi		
	D	Pemberlakuan disahkan oleh Kepala Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah		
2	Apakah Kelengkapan Struktur dan Muatan KTSP mencakup :			
	A	Visi, Misi Tujuan Sekolah		
	B	Struktur Kurikulum		
	C	Program muatan lokal		
	D	Kegiatan pengembangan diri (mencakup: jenis program dan strategi pelaksanaan)		
	E	Pengaturan beban belajar		
	F	KKM yang ditetapkan oleh sekolah untuk setiap Mapel		
	G	Pengaturan Kenaikan kelas dan penjurusan, kelulusan		
	H	Mutasi peserta didik		
	I	Pendidikan kecakapan hidup		
	J	Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global		
	K	Kalender Pendidikan		

3	Apakah Visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan strategi (mencerminkan upaya untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang berkualitas, dan didukung dengan suasana belajar dan suasana sekolah yang memadai/menyenangkan dan mencirikan adanya program keunggulan lokal		
4	Apakah Visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan strategi yang mencerminkan upaya pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas peserta didik sesuai dengan tuntutan standar nasional pendidikan, yang dirumuskan bersama oleh seluruh warga sekolah.		
5	Apakah Sekolah Memiliki program pengembangan diri?		
6	Apakah Kalender pendidikan tingkat satuan pendidikan disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik sekolah serta mengacu pada SI mencakup :		
	A Perhitungan minggu efektif pembelajaran		
	B Waktu libur		
	C Ulangan dan ujian		
	D Kegiatan khusus yang diprogramkan sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif		
7	Apakah Sekolah Membentuk Tim Pengembang KTSP dilengkapi dengan SK, uraian tugas, Program Kerja dan Jadwal Kegiatan ?		
8	Apakah Sekolah Memiliki dokumen hasil analisis konteks dan menyusun hasil analisis yang meliputi :		
	A Identifikasi Standar Isi, SKL, Standar Pengelolaan, Standar Proses, dan , Standar Penilaian		
	B Analisis satuan pendidikan (peserta didik, pendidik & tenaga kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, Program-program sekolah)		
	C Analisis peluang dan tantangan masyarakat dan lingkungan (Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Asosiasi Profesi, Dunia Usaha/Dunia Kerja, Sumber Daya Alam, Sosial Budaya)		
Dokumen Silabus			
9	Apakah Sekolah Mengkaji substansi SK/KD pada Standar Isi dan menjabarkannya ke dalam indikator, mengidentifikasi Materi Pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan jenis penilaian dan alokasi waktu		
10	Apakah Sekolah Memiliki dokumen hasil analisis pemetaan SK/KD ?		

11	Apakah Sekolah Memiliki dan memanfaatkan berbagai panduan dan contoh silabus yang dikembangkan oleh Pusat sebagai referensi dalam menyusun silabus secara mandiri dengan melibatkan seluruh guru untuk setiap matapelajaran termasuk muatan lokal.		
12	Apakah Sekolah Memiliki silabus semua mata pelajaran semua tingkat kelas yang memuat pengalaman belajar yang luas mencakup seluruh matapelajaran, yang dikembangkan melalui proses penjabaran SK/KD menjadi indikator, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran dan jenis penilaian?		
13	Apakah Sekolah Melakukan analisis pengintegrasian substansi/bahan kajian keunggulan lokal, pada KD matapelajaran tertentu yang relevan dan mengembangkannya dalam silabus dan RPP.		
14	Apakah Sekolah Memiliki SKL, SK, KD dan Silabus muatan lokal semua tingkat kelas?		
15	Apakah Sekolah dalam penyelenggaraan program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) memiliki :		
a	hasil analisis potensi daerah yang mendorong keunggulan lokal		
b	program RPBKL terintegrasi pada matapelajaran		
c	program RPBKL melalui program muatan lokal		
d	program RPBKL melalui matapelajaran keterampilan		
16	Apakah Sekolah Memiliki dokumen silabus dalam bentuk digital?		
17	Apakah Silabus yang disusun telah mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis TIK?		
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) :			
18	Apakah Kelengkapan dokumen penetapan KKM sudah disusun :		
a	berdasarkan hasil analisis kompleksitas kompetensi, intake peserta didik , sumber daya pendukung		
b	mulai dari KKM indikator, KKM KD, KKM SK, KKM matapelajaran		
c	KKM disetujui dalam rapat Dewan Pendidik		
d	Disahkan oleh Kepala Sekolah		
19	Apakah KKM sekolah per matapelajaran sudah sesuai?		

Kreteria Kelulusan			
20	Apakah Sekolah ada Kriteria kelulusan US (KL-US)?		
21	Apakah Sekolah ada Data Persentase lulusan Ujian Nasional tiga tahun terakhir?		
22	Apakah Sekolah Memiliki data Persentase lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi (x)?		
Perencanaan Proses Pembelajaran			
23	Apakah Komponen RPP sudah mencakup :		
	a Identitas matapelajaran, SK, KD, Indikator, Alokasi waktu		
	b Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian Hasil Belajar, dan sumber belajar		
24	Apakah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan dari silabus oleh setiap Guru (mencakup satu KD yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih)?		
25	Apakah Sekolah Memiliki RPP pendidikan keunggulan lokal terintegrasi sesuai dengan silabus yang dikembangkan?		
26	Apakah Sekolah memiliki bahan ajar dalam bentuk cetakan (Modul, Hand Out, LKS dll), dengan mengintegrasikan bahan kajian keunggulan lokal?		
27	Apakah Guru mengembangkan Bahan ajar dalam bentuk Cetakan (modul, <i>hand out</i> , LKS, dll)?		
28	Apakah Guru mengembangkan bahan ajar dalam bentuk Bahan ajar berbasis TIK?		
Pelaksanaan proses pembelajaran			
29	Apakah sudah terpenuhi Jumlah max 32 peserta didik/rombel?		
30	Apakah Sudah terpenuhi Beban Kerja guru 24 jam per minggu?		
31	Apakah sudah terpenuhi Ketersediaan buku teks matapelajaran dengan rasio satu buku per peserta didik ?		
32	Apakah sudah terpenuhi Rasio minimal jumlah peserta didik terhadap jumlah guru sebesar 20:1 ?		
33	Apakah sudah sesuai Proses Pembelajaran guru melalui langkah-langkah pembelajaran: pembukaan, inti, penutup?		

34	Apakah Sekolah sudah memanfaatkan laboratorium dalam KBM?		
35	Apakah Sekolah Memiliki penasehat akademik yang dapat mendeteksi potensi peserta didik (bisa dengan tes bakat disertai data prestasi belajar), memberikan bimbingan akademik dan non akademik, membantu memecahkan masalah peserta didik?		
36	Apakah Sekolah memiliki Program Penilaian, remedial dan pengayaan sepanjang semester?		
37	Apakah Sekolah Menerapkan pembelajaran berbasis TIK?		
38	Apakah Sekolah melakukan penelusuran bakat dan minat peserta didik, dalam rangka pemilihan program keunggulan lokal oleh peserta didik?		
Pengawasan proses pembelajaran			
39	Apakah Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pemantauan proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi?		
40	Apakah Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan supervisi proses pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi?		
41	Apakah Sekolah melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses, dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru?		
42	Apakah Guru memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran (remedial dan pengayaan)?		
43	Apakah Sekolah Melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan?		
44	Apakah Sekolah Memberikan penguatan dan penghargaan kepada guru yang telah memenuhi standar dan teguran yang bersifat mendidik kepada guru yang belum memenuhi standar?		
Tenaga Pendidik			
45	Apakah Pendidik berkualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)?		

46	Apakah Pendidik berlatar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan sesuai dengan matapelajaran yang diampu?		
47	Apakah Pendidik bersertifikat profesi guru (SP)?		
48	Apakah Pendidik mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi?		
Tenaga kependidikan			
49	Untuk Tenaga kependidikan yang dimiliki oleh sekolah apa sudah ada:		
	a Kepala sekolah		
	b Tenaga administrasi		
	c Tenaga perpustakaan		
	d Tenaga laboratorium		
	e Tenaga kebersihan		
50	Untuk Kriteria Tenaga Perpustakaan apa sudah:		
	a Memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya atau memiliki sertifikat pustakawan		
	b Mampu mengoperasikan komputer		
51	Untuk Kriteria Tenaga Laboran apa sudah:		
	a Memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya		
	b Mampu menerapkan TIK (Mengoperasikan program office : Word, Excel, Power Point)		
52	Apakah Sekolah Memiliki teknisi TIK (boleh guru maupun tenaga khusus)?		
53	Apakah Tenaga Administrasi mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi (TA)?		
54	Apakah Kepala Sekolah Mampu menggunakan internet sebagai sarana komunikasi ?		
55	Apakah Tenaga administrasi menerapkan TIK (Kemampuan mengoperasikan MS Office) yang meliputi :		
	a MS Acces		
	b MS Excel		
	c MS Word		
Tenaga Layanan Khusus			
56	Apakah Sekolah Satuan pendidikan memiliki tenaga layanan khusus diantaranya:		
	a penjaga sekolah		

	b	tenaga kebersihan		
	c	pengemudi		
	d	tukang kebun		
	e	pesuruh		
57	Apakah Sekolah Satuan pendidikan memiliki tenaga layanan khusus dalam bidang Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang meliputi :			
	a	Pelaksana Operasional Pusat Sumber Belajar (PJP Pelaksana RPSB)		
	b	Pengembang Konten Pusat Sumber Belajar		
	c	Pengelola Teknis Jaringan Pusat Sumber Belajar (Admin/teknisi RPSB)		
	d	Pengelola Paket Administrasi Sekolah (PAS)		
Satuan pendidikan				
58	Apakah Sekolah Memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar?			
Lahan				
59	Apakah Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun?			
Bangunan gedung				
60	Apakah Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt?			
61	Apakah Sekolah Memiliki Sumber Daya Listrik yang mencukupi (untuk PSB)?			
62	Apakah Bangunan secara berkala dilakukan pemeliharaan baik ringan maupun berat (Kebersihan, Kenyamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keamanan)?			
Ruang kelas				
63	Apakah Jumlah minimum ruang kelas sama dengan jumlah rombongan belajar?			
64	Apakah Ruang kelas dilengkapi sarana meliputi:			
	a	perabot (kursi dan meja peserta didik, kursi dan meja guru, lemari dan papan pajang)		
	b	media pendidikan (papan tulis)		
	c	perlengkapan lain (tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, soket listrik)		

65	Apakah Ruang kelas memiliki pencahayaan yang memadai?		
66	Apakah Ruang kelas terpasang perangkat TIK (minimal LCD Projektor)?		
Ruang perpustakaan			
67	Apakah Luas ruang perpustakaan minimum 30 m ² dengan lebar minimum 5 m?		
68	Apakah Ruang perpustakaan dilengkapi buku:		
	a buku teks pelajaran dan buku panduan pendidik,		
	b buku pengayaan,		
	c buku referensi dan sumber belajar lain		
69	Apakah ruang perpustakaan dilengkapi dengan perabot :		
	a rak buku		
	b rak majalah		
	c rak surat kabar		
	d meja baca		
	e kursi baca		
	f kursi kerja		
	g meja kerja/sirkulasi		
	h lemari katalog		
	i Lemari		
	j papan pengumuman		
	k meja multi media		
70	Apakah ruang perpustakaan dilengkapi dengan komputer administrasi perpustakaan?		
71	Apakah ruang perpustakaan dilengkapi dengan bahan ajar berbasis TIK berbentuk CD/Multimedia?		
Laboratorium biologi			
72	Apakah Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar?		
73	Apakah Luas laboratorium biologi minimum 48 m ² untuk jumlah siswa kurang dari 20 luas per anak min 2,4 m ² dan ruang penyimpanan 18 m ² ?		
74	Apakah Ruang laboratorium sudah dilengkapi :		
	a perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan)		
	b media pendidikan		

	c	bahan habis pakai		
Laboratorium fisika				
75	Apakah Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar?			
76	Apakah Luas laboratorium Fisika minimum 48 m ² atau untuk jumlah siswa kurang dari 20 luas per anak min 2,4 m ² dan ruang penyimpanan 18 m ² ?			
77	Apakah Ruang laboratorium sudah dilengkapi :			
	a	perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan)		
	b	media pendidikan		
	c	bahan habis pakai		
Laboratorium kimia				
78	Apakah Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar?			
79	Apakah Luas laboratorium Kimia minimum 48 m ² luas per anak min 2 m ² ?			
80	Apakah Ruang laboratorium dilengkapi sarana :			
	a	perabot, peralatan pendidikan (alat peraga, alat dan bahan percobaan)		
	b	media pendidikan		
	c	bahan habis pakai		
	d	Ruang asam		
Laboratorium komputer				
81	Apakah Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang?			
82	Apakah sudah sesuai Rasio minimum luas ruang laboratorium komputer 2 m ² /peserta didik. Lebar minimum ruang laboratorium komputer 5 m.?			
83	Apakah Ruang laboratorium dilengkapi sarana :			
	a	Komputer, printer		
	b	UPS		
	c	modul pembelajaran (hard copy maupun softcopy),		
	d	Jaringan LAN atau akses internet		

84	Apakah Ruang kelas memiliki pencahayaan dan pendinginan ruangan yang memadai?		
85	Apakah Sekolah Memiliki Laboratorium Komputer dengan jumlah komputer minimal 20 unit yang terhubung dengan internet?		
86	Apakah Komputer pada laboratorium Komputer telah terkoneksi dengan jaringan LAN?		
87	Apakah Laboratorium Komputer sudah memiliki dan mengadopsi jaringan dengan menggunakan server?		
Laboratorium bahasa			
88	Apakah Ruang laboratorium dapat menampung minimum 1 rombongan belajar?		
89	Apakah sudah sesuai Rasio minimum luas ruang laboratorium bahasa 2 m ² /peserta didik. Lebar minimum ruang laboratorium komputer 5 m.		
90	Apakah Ruang laboratorium dilengkapi sarana :		
	a perabot(meja, kursi), dan Perangkat Audio		
	b Prangkat Visual		
	c Modul Pembelajaran hardcopy/softcopy		
Ruang Pimpinan			
91	Apakah Luas ruang pimpinan minimum 12 m ² dengan lebar minimum 3 m?		
92	Apakah Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah?		
93	Ruang pimpinan apakah sudah memenuhi kriteria :		
	a untuk melayani tamu		
	b Dilengkapi perabot yang memadai		
	c Papan informasi kegiatan/statistik		
	d Nyaman dan bersih		
94	Apakah Ruang Pimpinan sudah dilengkapi :		
	a Komputer		
	b Printer		
	c Koneksi intranet		
	d Koneksi Internet		

Ruang Guru			
95	Apakah Luas ruang Guru minimum 72 m ² dengan Rasio minimum luas ruang 4 m ² /pendidik?		
96	Apakah Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah atau dari luar lingkungan sekolah dan dekat dengan ruang pimpinan?		
97	Apakah Ruang guru sudah :		
	a Mampu menampung semua Guru		
	b Dilengkapi perabot (meja, kursi, almari)		
	c Papan informasi kegiatan/statistik		
	d Komputer dan printer		
	e Nyaman dan bersih		
98	Apakah Pengaturan ruang guru memungkinkan untuk :		
	a mobilitas MGMP rumpun mata pelajaran		
	b memberikan layanan konsultasi akademik siswa		
99	Apakah Ruang Pendidik sudah dilengkapi? :		
	a Komputer		
	b Printer		
	c Koneksi intranet		
	d Koneksi Internet		
Ruang tata usaha			
100	Apakah Luas ruang tata usaha minimum 16 m ² dengan Rasio minimum luas ruang 4 m ² /pendidik?		
101	Apakah Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah atau dari luar lingkungan sekolah dan dekat dengan ruang pimpinan?		
102	Apakah Ruang tata usaha sudah :		
	a Sebagai tempat mengerjakan administrasi sekolah		
	b Dilengkapi perabot (meja, kursi, almari), papan informasi kegiatan/statistik ?		
	c Tertata rapi, nyaman dan bersih?		
	d Tersedia mesin ketik/ komputer/peralatan lainnya yang dibutuhkan?		
103	Apakah Ruang Tata Usaha sudah dilengkapi :		

	a	Komputer		
	b	Printer		
	c	Koneksi intranet		
	d	Koneksi Internet		
Tempat beribadah				
104	Apakah sudah ada tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan dengan luas minimum 12 m ² .			
105	Tempat ibadah apakah sudah memenuhi kriteria :			
	a	Luas memadai sesuai kebutuhan atau minimal 12 m ²		
	b	Tersedia perabot dan perlengkapan ibadah		
	c	Tertata rapih, nyaman dan bersih		
Ruang Konseling				
106	Apakah Luas ruang konseling minimum 12 m ² ?			
107	Apakah Ruang koseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik?			
108	Ruang konseling apakah sudah memenuhi kriteria:			
	a	Luas memadai sebagai tempat layanan konseling		
	b	Perabot (meja+kursi kerja, kursi tamu, almari) sesuai kebutuhan		
	c	Peralatan konseling (instrumen konseling, buku sumber, media pengemb. kepribadian)		
	d	Nyaman, bersih dan menjamin privasi peserta didik		
Ruang UKS				
109	Apakah Luas ruang UKS minimum 12 m ²			
110	Apakah Ruang UKS sudah memenuhi kriteria :			
	a	Luas memadai untuk penanganan dini yang mengalami gangguan kesehatan		
	b	Perabot (tempat tidur, almari, meja+kursi)		
	c	Perlengkapan kesehatan (P3K, tandu, selimut, tensimeter, termometer badan, timbang badan, dll)		
	d	Tertata rapi, nyaman dan bersih		
Ruang organisasi kesiswaan				
111	Apakah Luas ruang organisasi kesiswaan minimum 9 m ² ?			

112	Apakah Ruang organisasi kesiswaan memenuhi kriteria :			
	a	Luas memadai untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan		
	b	Perabot (meja+kursi, almari, papan tulis)		
	c	Tertata rapi, nyaman dan bersih		
Jamban				
113	Untuk jamban apakah sudah memenuhi kriteria :			
	a	Minimal rasio 1:30 untuk peserta putri dan 1:40 untuk peserta putra		
	b	Tersedia minimal 1 unit untuk tendik		
	c	Bersih dan terawat		
114	Apakah Luas minimum 2 m ² /jamban sudah sesuai?			
Gudang				
115	Apakah Luas Gudang minimum 21 m ² ?			
116	Apakah Gudang Sekolah sudah memenuhi kriteria :			
	a	Luas memadai sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran, peralatan sekolah, arsip sekolah		
	b	Perabot (almari dan rak)		
	c	Bersih, rapih dan aman		
Ruang sirkulasi				
117	Apakah Ruang sirkulasi berfungsi sebagai:			
	a	tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah		
	b	tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran		
Tempat bermain/berolahraga				
118	Apakah Luas tempat bermain/berolahraga minimum 3 m ² /peserta didik?			
119	Apakah tempat bermain/berolahraga berupa :			
	a	ruang terbuka		
	b	sebagian ditanami pohon		

	c	tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas		
	d	tidak digunakan parkir		
120	Apakah tempat bermain/berolahraga sudah memenuhi kriteria:			
	a	Luas memadai sebagai tempat bermain/berolahraga, upacara, dan ekstrakurikuler		
	b	Peralatan pendidikan (peralatan upacara, peralatan olahraga, peralatan seni budaya, peralatan keterampilan, dll)		
	c	Rapih, bersih, nyaman		
Kebersihan dan keindahan				
121	Apakah semua lahan, bangunan/gedung, sarana dan prasarana lainnya sudah memenuhi kriteria:			
	a	tertata rapih, terpelihara		
	b	keadaan bersih		
	c	aman dan nyaman		
122	Apakah sekolah berupaya untuk meoptimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan PBKL?			
Jaringan Telekomunikasi dan internet				
123	Apakah terdapat koneksi Internet di sekolah untuk menunjang operasional kegiatan PSB?			
124	Apakah sudah sesuai Kapasitas bandwidth rata-rata yang tersedia di sekolah?			
125	Apakah terdapat hot spot di lingkungan sekolah?			
126	Apakah sekolah menyediakan komputer yang terhubung internet selain di Lab komputer untuk mencari sumber belajar bagi Peserta Didik maupun guru?			
127	Apakah sekolah memiliki jaringan LAN antar ruangan di:			
	a	Laboratorium Komputer		
	b	Ruang Tata Usaha		
	c	Ruang Guru		
	d	Perpustakaan		

	e	Ruang Kepala Sekolah		
128		Apakah keseluruhan jaringan komputer di sekolah telah terhubung dengan internet?		
Website sekolah				
129		Apakah sekolah memiliki website sekolah?		
130		Apakah Website sekolah berbasis portal?		
Perencanaan program				
131		Sekolah memiliki visi, misi dan tujuan sekolah, apakah sudah mencakup :		
	a	Visi, misi dan tujuan mudah dipahami dan saling terkait satu dengan lainnya		
	b	Dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan		
	c	Ditetapkan oleh rapat dewan pendidikan		
	d	disosialisasikan kepada warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan		
132		Apakah dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan sudah:		
	a	disetujui rapat dewan pendidik		
	b	memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan		
	c	disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota bagi sekolah negeri dan oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta		
133		Apakah sekolah sudah memiliki rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S) dengan kriteria :		
	a	disetujui rapat dewan pendidik		
	b	memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah		
	c	disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota bagi sekolah negeri dan oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta		
134		Apakah rencana kerja tahunan memuat :		

	a	kesiswaan		
	b	kurikulum dan kegiatan pembelajaran		
	c	pendidik dan tenaga kependidikan		
	d	sarana dan prasarana		
	e	keuangan dan pembiayaan		
	f	budaya dan lingkungan sekolah		
	g	peran serta masyarakat dalam pendidikan		
	h	rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan mutu		
135	Apakah Sekolah memiliki rencana pengembangan Pusat Sumber Belajar yang mencakup:			
	a	Rencana kerja jangka menengah (empat tahunan)		
	b	Rencana kerja tahunan		
	c	Rencana kerja jangka menengah dan tahunan disetujui rapat dewan pendidik		
136	Apakah sekolah memiliki panduan pelaksanaan PBKL?			
Pelaksanaan rencana kerja				
137	Apakah Sekolah Memiliki pedoman pengelolaan sekolah berupa :			
	a	KTSP		
	b	kalender pendidikan		
	c	struktur organisasi sekolah		
	d	pembagian tugas diantara guru dan tenaga kependidikan		
	e	tata tertib sekolah		
	f	peraturan akademik		
	g	kode etik sekolah		
	h	biaya operasional sekolah		
138	Apakah Sekolah memiliki Struktur organisasi sekolah yang berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan?			
139	Apakah Sekolah memiliki program kerja sekolah dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan implementasi PBKL?			
140	Apakah Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional proses penerimaan peserta didik?			

141	Apakah Sekolah menjalin kemitraan dengan sekolah sekitar (minimal 2 sekolah mitra)?			
142	Apakah Sekolah menyusun dan menetapkan peraturan akademik yang berisi :			
	a	Persyaratan minimal kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru		
	b	Ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan		
	c	Ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru matapelajaran, wali kelas, dan konselor		
143	Apakah Sekolah melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan mencakup :			
	a	promosi berdasarkan azas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme		
	b	pengembangan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah		
	c	penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas		
	d	mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan		
144	Apakah dalam pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana mencakup :			
	a	Upaya merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan, sarana dan prasarana pendidikan		
	b	Evaluasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana		
	c	Upaya melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap kelas		
145	Apakah dalam melaksanakan pengelolaan pembiayaan sesuai dengan pedoman pengelolaan pembiayaan meliputi:			
	a	sumber pemasukkan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola		
	b	penyusunan dan pencairan anggaran		

	c	penggalangan dana diluar dana investasi dan operasional		
	d	penggunaan anggaran keuangan sesuai dengan RKA-S		
	e	pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran		
	f	dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya		
146	Apakah Sekolah tercipta suasana, iklim dan lingkungan sekolah yang kondusif dengan minimal kondisi :			
	a	Tersedia akses informasi-informasi penting yang mudah diakses oleh warga dan tamu sekolah		
	b	Tersedia petunjuk, peringatan, larangan dan sanksi dalam berperilaku di		
	c	Dilaksanakannya sistem penghargaan dan sanksi		
	d	Teramati kedisiplinan warga sekolah (taat asas dan taat waktu)		
	e	Teramati tata pergaulan didalam sekolah dengan saling menghormati		
	f	Sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah terjaga		
147	Apakah Sekolah menjalin kemitraan minimal dengan PT, SMP/MTs, dunia usaha dan industri berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan berdasarkan perjanjian tertulis?			
Pengawasan				
148	Apakah Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan?			
149	Apakah ada pelaksanaan pemantauan secara teratur dan berkelanjutan oleh komite sekolah untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan?			
150	Apakah pelaksanaan supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah?			
Evaluasi				
151	Apakah Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah yang meliputi :			
	a	Evaluasi proses pembelajaran, sekurang-kurangnya 2 kali per tahun, pada akhir semester akademik		

	b	Evaluasi program kerja tahunan sekurang-kurangnya satu kali setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah		
152		Apakah Sekolah melakukan evaluasi dan pengembangan KTSP?		
153		Apakah Sekolah melakukan pelacakan terhadap alumni?		
154		Apakah Sekolah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler?		
155		Apakah Sekolah melakukan pembinaan prestasi unggulan?		
156		Apakah Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan secara komperhensif pada setiap akhir semester yang meliputi :		
	a	kesesuaian penugasan dengan keahlian		
	b	keseimbangan beban kerja		
	c	kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas		
157		Apakah Sekolah ada hasil Pencapaian Akreditasi		
158		Apakah Sekolah melakukan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan PSB?		
Kepemimpinan sekolah				
159		Apakah Kepala sekolah dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana dan kesiswaan?		
160		Apakah Wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik dan proses pengangkatan serta keputusannya dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi di atasnya (untuk sekolah swasta institusi yang dimaksud adalah penyelenggara sekolah)		
Sistem informasi manajemen (SIM)				
161		Apakah Sekolah mengelola SIM yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel yang mencakup :		
	a	Menyediakan fasilitas informasi (website/jejaring sosial/leaflet/ booklet/majalah/papan informasi, papan informasi, LAN dan sejenisnya) yang mudah diakses		

	b	Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi rnaupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan		
	c	Melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.		
162	Apakah Sekolah menggunakan sebagian atau seluruh modul-modul di bawah ini :			
	a	Memiliki aplikasi penerimaan Peserta Didik baru		
	b	Memiliki aplikasi pengelolaan data personal Peserta Didik		
	c	Memiliki aplikasi pengelolaan hasil proses pembelajaran Peserta Didik		
	d	Memiliki aplikasi pengelolaan proses keuangan		
	e	Memiliki aplikasi pengelolaan data guru dan karyawan		
	f	Memiliki aplikasi pengelolaan aset dan perlengkapan		
	g	Memiliki aplikasi publikasi informasi		
	h	Memiliki aplikasi konsolidasi laporan periodik pendidikan		
	i	Memiliki aplikasi pengelolaan ruangan belajar		
	j	Memiliki aplikasi pengelolaan jadwal pengajaran		
	k	Memiliki aplikasi pengelolaan jadwal guru mengajar		
	l	Memiliki aplikasi pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler		
Jenis pembiayaan				
163	Apakah Sekolah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya investasi termasuk biaya pengembangan keunggulan lokal yang berupa:			
	a	Sarana prasarana		
	b	Peserta Didik		
	c	Pendidik		
	d	Tenaga Kependidikan		

164	Apakah Sekolah mengalokasikan biaya pengembangan sarana TIK pada :			
	a	Pengadaan sarana prasarana		
	b	Perawatan		
	c	Pendidik		
	d	Tenaga Kependidikan		
165	Apakah Sekolah mengalokasikan biaya operasi meliputi :			
	a	Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai		
	b	Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya		
166	Apakah Sekolah bersama komite sekolah merancang dan menetapkan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan?			
Sumber pembiayaan				
167	Apakah Sekolah menggali sumber-sumber pembiayaan pendidikan dari orang tua peserta didik/masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan secara mandiri?			
	a	Sumber dana dari Orang Tua /Masyarakat		
	b	Sumber dana dari Pemerintah		
	c	Sumber dana dari Donatur Lain		
168	Apakah Sekolah memiliki program kerja operasional tahunan dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber?			
169	Apakah Sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber dalam Implementasi PBKL?			
Pelaporan				
170	Apakah Sekolah membuat laporan pertanggung-jawaban secara akuntabel dan transparan?			
Prinsip penilaian				

171	Apakah seluruh pendidik (x) telah melakukan penilaian hasil belajar untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas?		
172	Apakah Sekolah memiliki petunjuk operasional penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar?		
173	Apakah Sekolah memiliki petunjuk operasional penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar melalui media elektronik.		
Teknik dan instrumen penilaian			
174	Apakah teknik penilaian dilakukan sesuai KD dengan kriteria:		
	a Terprogram menggunakan Tes dan Non Tes		
	b Menggunakan soal yang memenuhi kaidah substansi konstruksi dan bahasa		
Mekanisme dan prosedur penilaian			
175	Apakah Sekolah mengembangkan program penilaian menggunakan lima langkah yaitu :		
	a Menyusun kisi-kisi tes		
	b Mengembangkan instrumen		
	c mengolah dan menentukan kelulusan siswa dari sekolah		
	d Melaksanakan tes		
	e Melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian		
176	Apakah seluruh pendidik (x) telah melakukan penilaian hasil belajar untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas?		
177	Apakah Sekolah melakukan penilaian internal untuk semua matapelajaran yang tidak dites dalam UN yang mencakup:		
	a Menyusun kisi-kisi prediksi soal US		
	b Menyusun soal prediksi US		
	c Menyelenggarakan Pendalaman materi (PM)		
	d Melaksanakan tes Pra US		
	e Melakukan Pengolahan hasil Pra US		

178	Apakah Guru Agama melakukan:			
	a	penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia		
	b	memanfaatkan informasi dari pendidik matapelajaran lain dan sumber lain yang relevan		
179	Apakah Guru Pendidikan Kewarganegaraan melakukan:			
	a	penilaian kepribadian		
	b	memanfaatkan informasi dari pendidik matapelajaran lain dan sumber lain yang relevan		
180	Apakah Sekolah menerbitkan surat keterangan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pengembangan diri yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah?			
181	Apakah Guru matapelajaran menginformasikan hasil ulangan harian kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya			
182	Apakah Guru matapelajaran memberi remedi kepada peserta didik yang belum mencapai KKM?			
183	Apakah hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi matapelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar?			
Penilaian oleh pendidik				
184	Apakah Guru menginformasikan silabus matapelajaran kepada peserta didik pada awal semester?			
185	Apakah Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih?			
185	Apakah Guru melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan sesuai dengan RPP?			
186	Apakah Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik?			
187	Apakah Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik?			
188	Apakah Analisis dan pemanfaatan hasil penilaian dibuat dengan:			

	a	Hasil Penilaian dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan yang mendidik		
	b	analisis daya serap hasil penilaian		
	c	Hasil Analisis ditindak lanjuti dengan Remedi / Pengayaan		
	d	Hasil Penilaian digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran		
Penilaian oleh satuan Pendidikan				
189	Apakah Sekolah menetapkan dan mendokumentasikan:			
	a	KKM setiap matapelajaran		
	b	kriteria kenaikan kelas		
	c	kreteria kelulusan peserta didik		
190	Apakah Sekolah menentukan nilai akhir kelompok matapelajaran estetika dan kelompok matapelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui:			
	a	rapat dewan pendidik		
	b	mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik		
191	Apakah Sekolah menentukan nilai akhir kelompok matapelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:			
	a	rapat dewan pendidik		
	b	mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah		

....., 2013
Kepala SMA
(Responden)

(.....)

Lampiran 3

Rekapitulasi Hasil Angket :

No.	Nama Sekolah	Standar, Jml Komponen Pertanyaan dan Jawaban																Total	
		Standar Isi		Standar SKL		Standar Proses		Standar PTK		Standar Sarparas		Standar Pengelolaan		Standar Pembiayaan		Standar Penilaian			
		38		8		23		28		146		88		17		40		388	
		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator	
Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	SMAN-1 P.Bun	34	4	8	0	22	1	21	7	132	14	79	9	17	0	39	1	352	36
2	SMAN-2 P.Bun	36	2	4	4	19	4	20	8	139	7	73	15	13	4	40	0	344	44
3	SMAN-3 P.Bun	34	4	7	1	19	4	19	9	114	32	75	13	13	4	39	1	320	68
4	SMAN-1 Kumai	34	4	7	1	19	4	18	10	108	38	80	8	16	1	36	4	318	70
5	SMAN-2 Kumai	34	4	8	0	21	2	22	6	109	37	85	3	14	3	38	2	331	57
6	SMAN-1 Kolam	31	7	6	2	15	8	21	7	84	62	63	25	16	1	34	6	270	118
7	SMAN-1P.Lada	38	0	8	0	17	6	21	7	91	55	82	6	16	1	40	0	313	75
8	SMAN-1P.Banteng	28	10	5	3	10	13	14	14	107	39	49	39	5	12	32	8	250	138
9	SMAN-1 Aruta	35	3	5	3	21	2	18	10	60	86	79	9	17	0	38	2	273	115
10	SMA Abdi P.Bun	31	7	6	2	13	10	23	5	92	54	80	8	15	2	40	0	300	88
11	SMA PGRI-1P.Bun	32	6	8	0	20	3	20	8	70	76	71	17	14	3	39	1	274	114
12	SMA PGRI Pirsus P.Lada	37	1	7	1	18	5	15	13	69	77	81	7	13	4	38	2	278	110

Lampiran 4

Rekapitulasi Hasil Angket Dalam Persentase :

Nama Sekolah	Standar, Jml Komponen Pertanyaan dan Jawaban																Total Rata-Rata	
	Standar Isi		Standar SKL		Standar Proses		Standar PTK		Standar Sarparas		Standar Pengelolaan		Standar Pembiayaan		Standar Penilaian			
	38		8		23		28		146		88		17		40		388	
	Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator		Indikator	
Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	
SMAN-1 P.Bun	89	11	100	0	96	4	75	25	90	10	90	10	100	0	98	2	91	9
SMAN-2 P.Bun	95	5	50	50	83	17	71	29	95	5	83	17	76	24	100	0	89	11
SMAN-3 P.Bun	89	11	88	13	83	17	68	32	78	22	85	15	76	24	98	2	82	18
SMAN-1 Kumai	89	11	88	13	83	17	64	36	74	26	91	9	94	6	90	10	82	18
SMAN-2 Kumai	89	11	100	0	91	9	79	21	75	25	97	3	82	18	95	5	85	15
SMAN-1 Kolam	82	18	75	25	65	35	75	25	58	42	72	28	94	6	85	15	70	30
SMAN-1P.Lada	100	0	100	0	74	26	75	25	62	38	93	7	94	6	100	0	81	19
SMAN-1P.Banteng	74	26	63	38	43	57	50	50	73	27	56	44	29	71	80	20	64	36
SMAN-1 Aruta	92	8	63	38	91	9	64	36	41	59	90	10	100	0	95	5	70	30
SMA Abdi P.Bun	82	18	75	25	57	43	82	18	63	37	91	9	88	12	100	0	77	23
SMA PGRI-1P.Bun	84	16	100	0	87	13	71	29	48	52	81	19	82	18	98	2	71	29
SMA PGRI Pirsus P.Banteng	97	3	88	12	78	22	54	46	47	53	92	8	76	24	95	5	72	28